



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2017

Pemerintah Daerah Kota Bima  
Tahun 2018

## ***Kata Pengantar***

Syukur Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga ikhtiar Kota Bima dalam melakukan pembenahan, perubahan dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan system akuntabilitas kinerja. Ikhtiar ini merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya peningkatan Pelayanan Publik.

Selanjutnya, sebagaimana bentuk pertanggungjawaban Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Pemerintah Kota Bima, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bima Tahun 2017 dengan menggunakan alat ukur yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2017. Laporan kinerja ini menyajikan berbagai hasil capaian kinerja, prestasi dan keberhasilan Pemerintah Kota Bima pada tahun 2017 dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Akhirnya, ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima yang telah bekerja keras bersama dalam mencapai berbagai sasaran strategis pembangunan pada tahun 2017 yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Bima.

WALIKOTA BIMA,

**M. QURAI S H. ABIDIN**

# *Daftar Isi*

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	i
BAB I Pendahuluan .....	1
BAB II Perencanaan Kinerja .....	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	35
BAB IV Penutup .....	110

# *Daftar Tabel*

# Daftar Gambar

GAMBAR 1. PETA ADMINISTRASI KOTA BIMA .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
GAMBAR 2. GRAFIK LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BIMA TAHUN 2012-2015.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
GAMBAR 3. BAGAN OPERASIONALISASI MISI I MENJADI TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA .....	17
GAMBAR 4. BAGAN OPERASIONALISASI MISI II MENJADI TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA .....	18
GAMBAR 5. BAGAN OPERASIONALISASI MISI III MENJADI TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA.....	19
GAMBAR 6. BAGAN OPERASIONALISASI MISI IV MENJADI TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA.....	20
GAMBAR 7. GRAFIK PERKEMBANGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH KOTA BIMA TAHUN 2013-2015.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
GAMBAR 8. GRAFIK PERKEMBANGAN IPM KOTA BIMA TAHUN 2011-2015.....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
GAMBAR 9. GRAFIK ANGKA KEMISKINAN KOTA BIMA TAHUN 2011-2015 .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
GAMBAR 10. GRAFIK PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA BIMA TAHUN 2012-2015 .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
GAMBAR 11. PERKEMBANGAN ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA BIMA TAHUN 2012-2015....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
GAMBAR 12. GRAFIK PERBANDINGAN ANGKA BALITA GIZI BURUK TAHUN 2014-2016 .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
GAMBAR 13. GRAFIK PERKEMBANGAN RUMAH TANGGA BERAKSES AIR BERSIH TAHUN 2014-2016 .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
GAMBAR 14. GRAFIK JUMLAH KASUS KRIMINALITAS DI KOTA BIMA TAHUN 2014-2016 .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>

# ***BAB I Pendahuluan***

## **A. Penjelasan Umum Organisasi**

Pemerintah Kota Bima dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintahan Kota Bima menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk dan menerapkan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, kewajiban lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Walikota sebagai Kepala Daerah, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Walikota sebagai Kepala Daerah adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, melaksanakan prinsip taat pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD. Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektifitas. Dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan asas ekonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun administrasi pemerintahan di Kota Bima, Walikota dibantu oleh kepala perangkat daerah yang merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Perangkat Daerah melaksanakan berbagai urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima maupun Peraturan Walikota Bima tentang Susunan, tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima sebagai perwujudan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bima mencakup 4 (empat) urusan yaitu: urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban, sosial. Kemudian yang kedua adalah urusan wajib bukan pelayanan dasar meliputi pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Adapun kewenangan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang meliputi: kelautan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian. Sedangkan urusan penunjang meliputi: administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Adapun organisasi perangkat Daerah Kota Bima menurut Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016, yaitu :

- a. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - 1) Sekretaris Daerah
  - 2) Asisten Pemerintahan dan Kesra, membidangi :
    - Bagian Administrasi Pemerintahan
    - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
    - Bagian Hukum
  - 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membidangi :
    - Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
    - Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
  - 4) Asisten Administrasi Umum, membidangi :
    - Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
    - Bagian Humas dan Protokol
    - Bagian Umum
- b. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - 1) Sekretaris DPRD
  - 2) Bagian Hukum dan Persidangan
  - 3) Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
  - 4) Bagian Keuangan



- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Dinas Kesehatan
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- g. Dinas Sosial
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- k. Dinas Tenaga Kerja
- l. Dinas Ketahanan Pangan
- m. Dinas Perhubungan
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika
- o. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- p. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
- q. Dinas Pariwisata
- r. Dinas Statistik
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- t. Dinas Kelautan dan Perikanan
- u. Satpol PP
- v. Inspektorat
- w. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- aa. Kecamatan Rasane Barat
- bb. Kecamatan Mpunda
- cc. Kecamatan Raba
- dd. Kecamatan Rasanae Timur
- ee. Kecamatan Asakota

## B. Aspek Strategis

Secara geografis Kota Bima terletak antara 118°41'00" - 118°48'00" Bujur Timur dan 8°30'00" - 8°20'00" Lintang Selatan dengan orientasi wilayah berada pada sebelah timur Teluk Bima Pulau Sumbawa. Luas wilayah Kota Bima adalah sebesar 222,25 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:

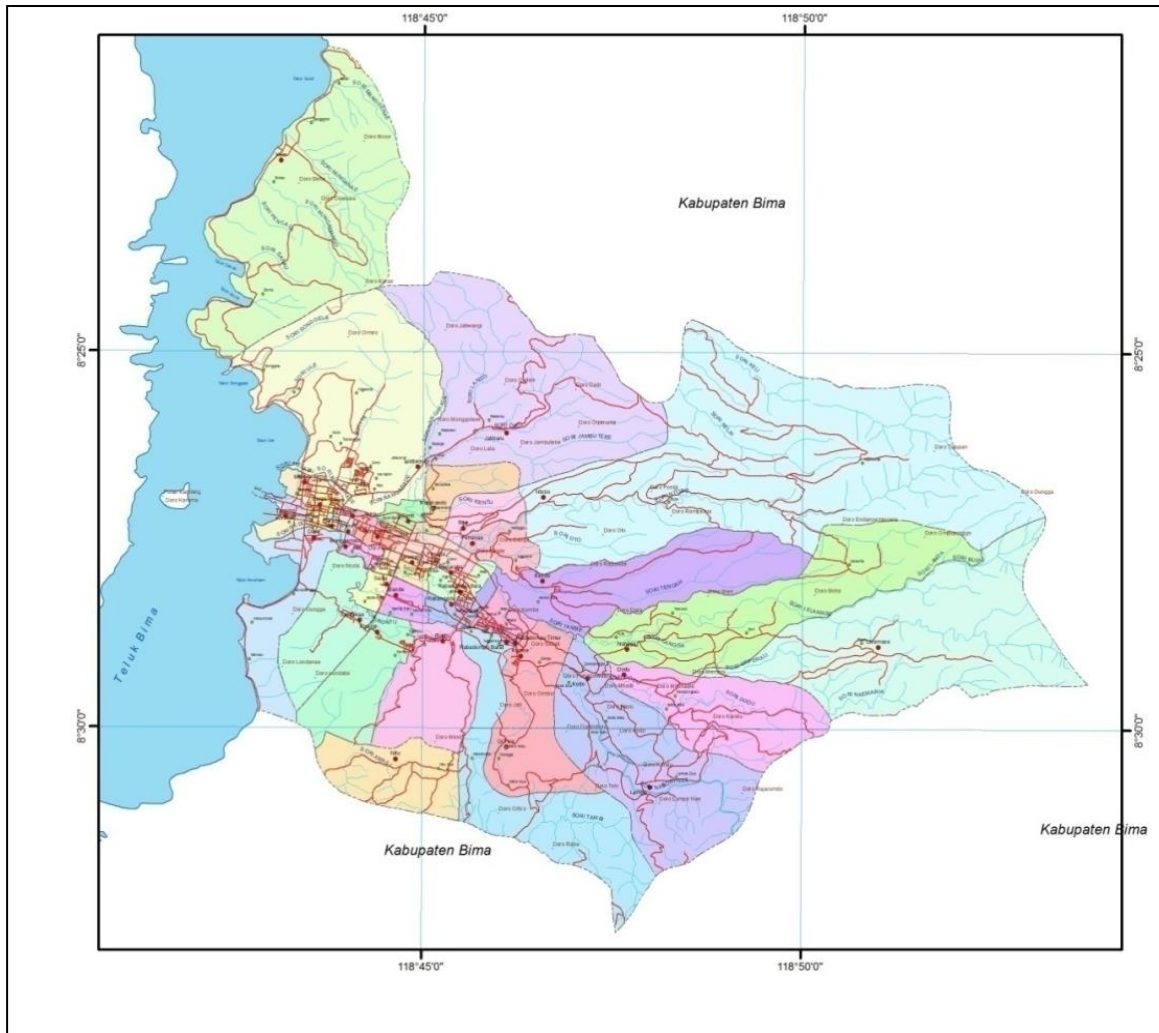
- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

Asakota merupakan kecamatan terluas dengan luas area mencapai 31 persen dari luas Kota Bima. Diurutan kedua ada Kecamatan Rasanae Timur dengan luas area mencapai 28,83 persen, selanjutnya Kecamatan Raba dengan luas sebesar 28,67 persen, Kecamatan Mpunda sebesar 6,88 persen. Sementara itu, Rasanae Barat adalah kecamatan dengan luas area paling kecil yaitu 4,56 persen dari luas Kota Bima.

**Tabel 1.1. Luas Wilayah Kota Bima**

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (dalam km <sup>2</sup> )
I.	Kecamatan Rasanae Barat	1. Kel. Tanjung	0,79
		2. Kel. Paruga	0,91
		3. Kel. SaraE	0,48
		4. Kel. NaE	0,31
		5. Kel. Pane	0,31
		6. Kel. Dara	7,34
		Jumlah I	10.14
II.	Kecamatan Mpunda	1. Kel. Sambinae	5,43
		2. Kel. Panggi	3,51
		3. Kel. Monggonao	0,63
		4. Kel. Manggemaci	0,52
		5. Kel. Penatoi	0,74
		6. Kel. Lewirato	0,49
		7. Kel. Sadia	0,68
		8. Kel. Mande	0,69
		9. Kel. Santi	
		10. Kel. Matakando	

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (dalam km <sup>2</sup> )
			0,72
			1,87
Jumlah II			15,28
III.	Kecamatan Raba	1. Kel. Penaraga	0,74
		2. Kel. Penanae	5,34
		3. Kel. Rite	1,84
		4. Kel. Rabangodu Utara	0,98
		5. Kel. Rabangodu Selatan	1,43
		6. Kel. Rabadompu Timur	0,54
		7. Kel. Rabadompu Barat	1,66
		8. Kel. Rontu	4,74
		9. Kel. Ntobo	31,19
		10. Kel. Kendo	9,08
		11. Kel. Nitu	6,19
Jumlah III			63,73
IV.	Kecamatan Asakota	1. Kel. Melayu	0,76
		2. Kel. Jatiwangi	22,18
		3. Kel. Jatibaru	19,60
		4. Kel. Kolo	26,49
Jumlah IV			69,03
V.	Kecamatan Rasanae Timur	1. Kel. Kumbe	1,52
		2. Kel. Lampe	7,23
		3. Kel. Oi Fo'o	9,20
		4. Kel. Kodo	5,55
		5. Kel. Dodu	7,93
		6. Kel. Lelamase	21,05
		7. Kel. Nungga	11,59
Jumlah V			64,07
Jumlah I + II + III + IV + V			222,25



**Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Bima**

Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2016 sebesar 147,92 mm/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan November yaitu 240 mm dan terendah pada bulan Agustus, yaitu 39 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2016 tercatat 165 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Februari yaitu 24 hari dan terendah pada bulan Juli dan September, yaitu 6 hari hujan.

Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2016 sebesar 85,08%, tertinggi 90% pada Bulan Desember dan terendah 79% pada Bulan November. Temperatur berkisar pada interval antara suhu minimal 22,40°C pada Bulan Agustus dan suhu maksimum 34,90°C pada Bulan Oktober, dengan rata-rata suhu 28,10°C.

Sedangkan ditinjau dari aspek morfologi, Kota Bima yang berada pada ketinggian antara 0-25 m dpl seluas 9.259 ha (42,62%), ketinggian 25-50 m seluas 5.161 ha (23,75%) dan di atas 50 m seluas 7.307 ha (33,63%). Adapun kondisi hidrologi wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.

**Tabel 1.2. Sungai di Kota Bima**

Nama Sungai		Panjang Sungai(km)	Lebar Sungai (m)	Kecamatan	
				Hulu	Hilir
1	Sungai Lampe	25	30	Rasanae Timur	Rasanae Barat
2	Sungai Dodu	12	20	Rasanae Timur	Rasanae Timur
3	Sungai Nungga	22	20	Rasanae Timur	Mpunda
4	Sungai Kendo	15	15	Raba	Rasanae Barat
5	Sungai Ntobo	12	20	Raba	Rasanae Barat
6	Sungai Jatiwangi	16	15	Asakota	Asakota
7	Sungai Romo	2	12	Asakota	Asakota

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima, 2017

Ditinjau dari rencana tata ruang nasional maupun rencana tata ruang wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Teluk Bima di bidang pertumbuhan ekonomi khususnya dengan fokus pengembangan sektor Pariwisata, Industri, dan Perikanan. Keberadaan Kota Bima sebagai KSP memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah Kota.

Secara kewilayahan Kota Bima dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dalam kerangka rencana struktur ruang dengan maksud untuk meningkatkan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah Kota. Adapun pusat-pusat pelayanan yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

- 1) Pusat pelayanan kota meliputi :

Pusat pelayanan Kota Bima di Kecamatan Rasanae Barat, sebagian Kecamatan Asakota dan sebagian Kecamatan Mpunda yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional serta pariwisata skala regional.

- a) Sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Mpunda yang meliputi Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia dan Kelurahan Sambinae dan berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, administrasi umum, dan pendidikan skala regional;
- b) Sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Raba yang meliputi Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Rabadompu Timur, dan Kelurahan Rabadompu Barat dan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri kecil dan kerajinan serta pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan
- c) Sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Oi Fo'o dan Kelurahan Nitu Kecamatan Rasanae Timur yang berfungsi sebagai pusat peruntukan industri.

2) Pusat lingkungan meliputi :

- a) Kelurahan Jatiwangi yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
- b) Kelurahan Mande yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pusat Peraturan Daerahgangan jasa skala regional;
- c) Kelurahan Manggemaci yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal serta sebagai pusat pelayanan umum;
- d) Kelurahan Santi yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal;
- e) Kelurahan Kodo dan sekitarnya yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pusat Peraturan Daerahgangan dan jasa skala lokal, pusat pelayanan kesehatan skala lokal, dan simpul transportasi skala lokal;
- f) Kelurahan Kolo yang berfungsi sebagai pusat pariwisata bahari, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal.

Pusat - pusat pelayanan tersebut di atas dikembangkan sebagai pusat aktivitas skala kota dan regional, karena memiliki daya tarik yang tinggi terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota. Disamping penetapan pusat-pusat pelayanan, dalam RTRW Kota

Bima juga ditetapkan beberapa kawasan strategis. Kawasan strategis ini dikembangkan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berkelanjutan. Kawasan strategis juga menjadi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh signifikan dalam lingkup kota maupun regional di bidang ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan.

Fungsi kawasan strategis kota dalam pembangunan berbasis spasial adalah :

- 1) Mendorong keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota secara berkelanjutan;
- 2) Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
- 3) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota dan penyusunan rencana rinci tata ruang kota.

Kawasan Strategis Kota meliputi Kawasan Strategis berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, Kepentingan Sosial Budaya, dan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Adapun wilayah kawasan strategis dimaksud adalah meliputi :

- 1) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi :
  - a. Kawasan Pantai Amahami – Ni'u di Kelurahan Dara, dan Pantai Kolo di Kelurahan Kolo dengan sektor unggulan pariwisata.
  - b. Kawasan Perkotaan yang meliputi di Kelurahan Sarae, kelurahan Tanjung, Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga dengan sektor unggulan Peraturan Daerahgangan dan jasa.
  - c. Kawasan Kelurahan Oi Fo'o, Kelurahan Nitu, Kelurahan Rontu, Kelurahan Panggi dengan sektor unggulan industri marmer.
- 2) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan sosial budaya meliputi : Kawasan Istana Kesultanan Bima dan sekitarnya meliputi Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan Melayu dan Kelurahan Dara.

Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan Hutan Lampe-Maria di Kelurahan Lampe dan Kawasan Nanga Nae Kapenta di Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Kolo yang berfungsi konservasi.

Dari aspek demografi, Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2016 mencapai 139.366 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 69.076 jiwa dan perempuan sebanyak 70.290 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 mencapai 1,1 persen atau bertambah 1.515 jiwa dari tahun 2015. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui dari angka rasio jenis kelamin (*sex ratio* sebesar 98,3. Hal ini mencerminkan bahwa di Kota Bima komposisi penduduk perempuan lebih dominan dibanding penduduk laki-laki. Ditingkat kecamatan, penduduk perempuan juga menunjukkan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki dengan rata-rata sex rasio sebesar 98,3.

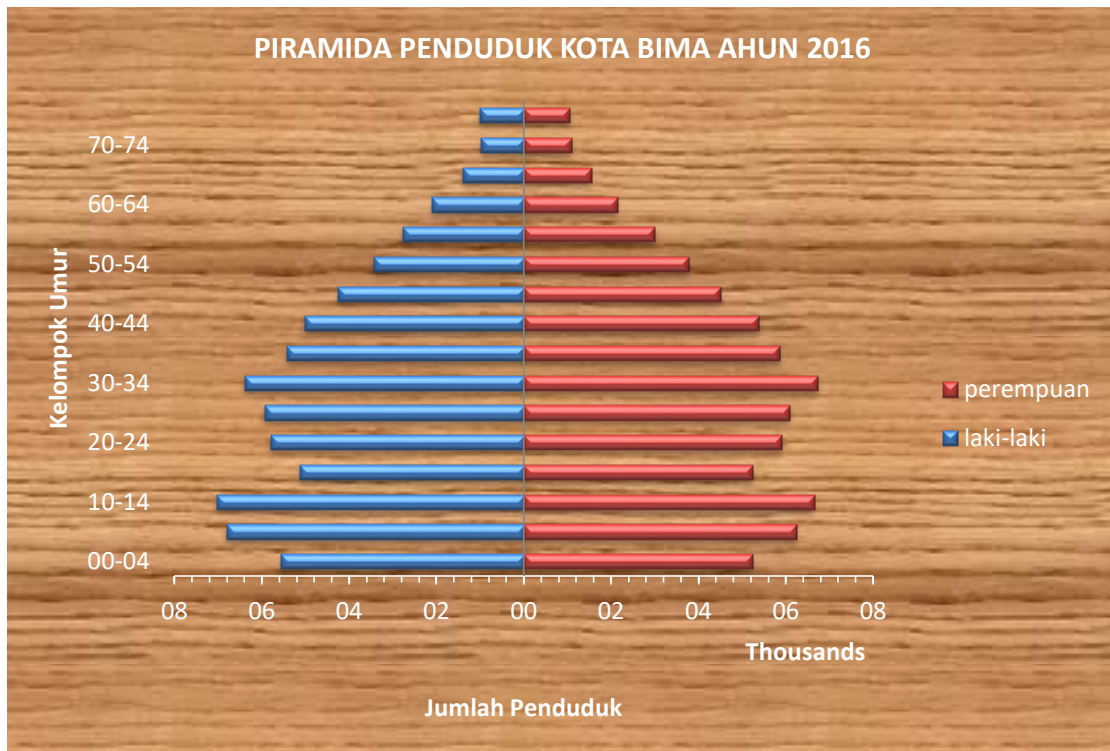
**Tabel 1.3.** Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
1.	Rasanae Barat	14.226	14.517	28.743	98,0
2.	Mpunda	14.258	14.674	28.932	97,2
3.	Raba	17.667	18.159	35.826	97,3
4.	Rasanae Timur	8.364	8.592	16.956	97,3
5.	Asakota	14.561	14.348	28.909	101,5
Jumlah Total		69.076	70.290	139.366	98,3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2017

Piramida penduduk menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Bima Tahun 2016 didominasi oleh penduduk usia produktif terutama usia 20-34 tahun dengan persentase kisaran 8-10 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan angkatan kerja di Kota Bima cukup tinggi. Bonus usia produktif ini tentu menjadi potensi bagi daerah untuk menarik investor guna berinvestasi di daerah, namun demikian harus diimbangi dengan usaha meningkatkan kapasitas SDM baik melalui perbaikan pendidikan, training, maupun melalui peningkatan derajat kesehatannya. Persiapan ini sangat penting guna mencetak angkatan kerja berkualitas dan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar tenaga kerja.



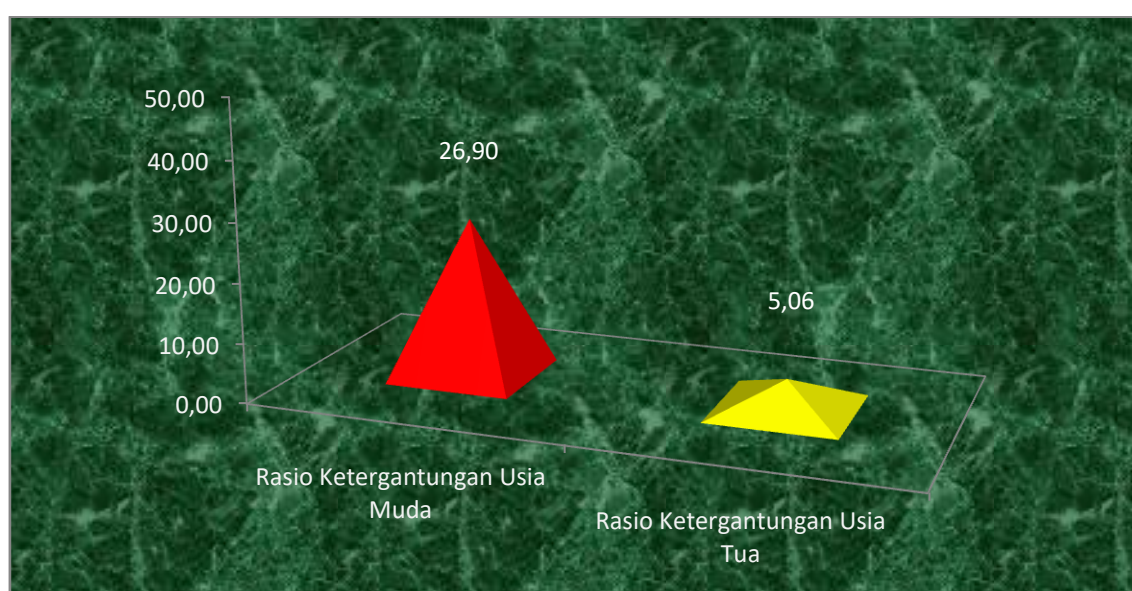


**Gambar 1.2. Piramida Penduduk Kota Bima Tahun 2016**

Selanjutnya, persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) juga terlihat cukup tinggi. Grafik yang melebar pada kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa angka kelahiran di Kota Bima cukup tinggi. Demikian juga yang terjadi pada kelompok umur 5-9 tahun menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah guna mempersiapkan generasi-generasi muda ini menjadi generasi potensial dimasa yang akan datang, salah satunya dengan mempersiapkan fasilitas-fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang bisa menampung kelompok usia ini. Hal ini menimbang bahwa dalam jangka waktu 5-14 tahun kedepan kelompok usia ini akan memasuki usia produktif yang diharapkan siap memasuki pasar tenaga kerja. Grafik yang semakin meruncing di bagian atas piramida menunjukkan semakin sedikitnya penduduk kelompok usia tidak produktif /usia tua. Hal ini bisa menggambarkan bahwa seiring dengan pertambahan usia menyebabkan angka kematian yang terjadi juga cukup tinggi.

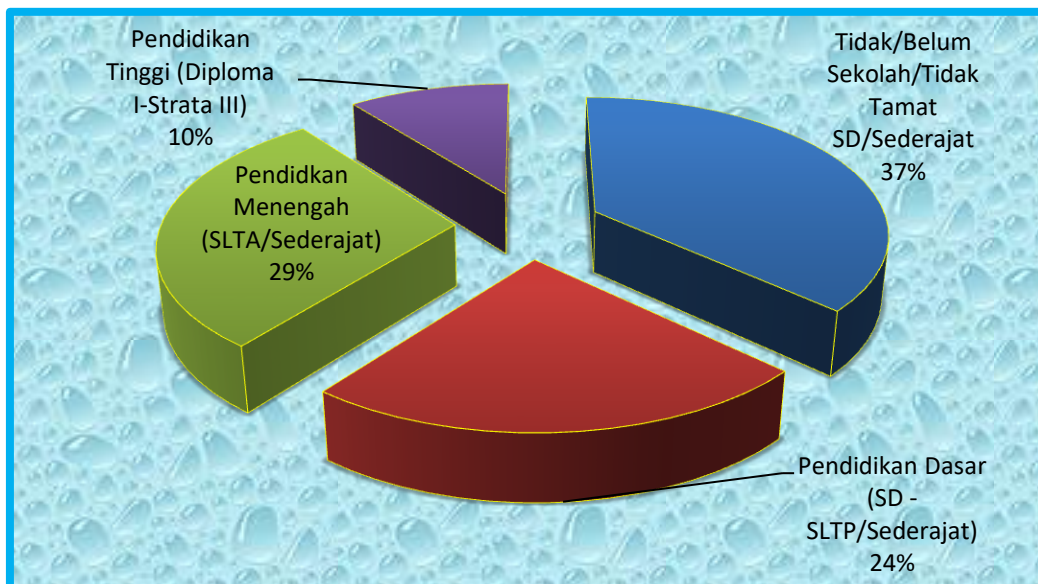
Selanjutnya dari data komposisi penduduk menurut kelompok umur ini, dapat dihitung tingkat ketergantungan penduduk yang belum/tidak produktif terhadap penduduk usia kerja yang dianggap sebagai penduduk produktif. Rasio ketergantungan penduduk Kota Bima Tahun 2016 adalah sebesar 31,96 persen, artinya setiap 100 orang

penduduk yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan lebih kurang 31-32 orang penduduk yang belum dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 31,96 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (umur dibawah 15 tahun) sebesar 26,90 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua (umur 65 tahun ke atas) sebesar 5,06 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2016, penduduk usia kerja di Kota Bima masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.



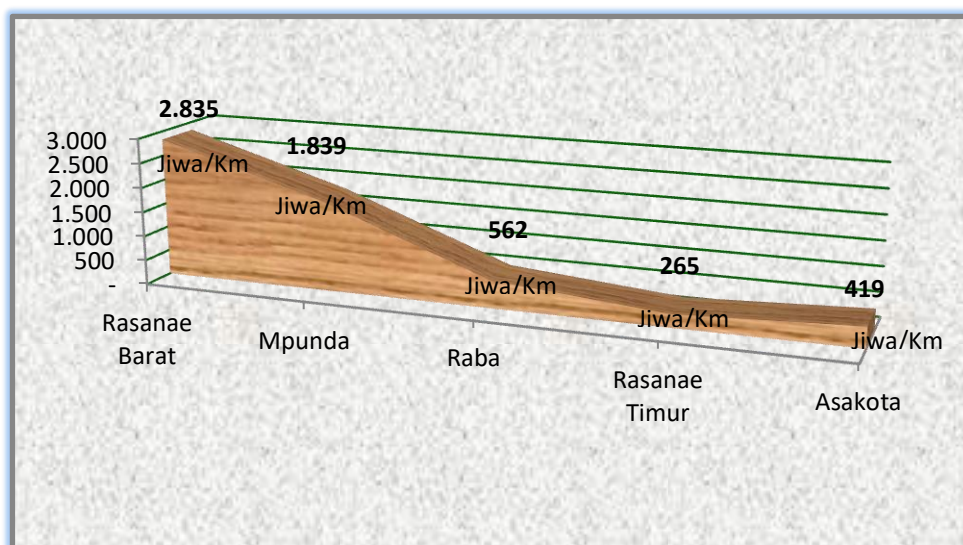
**Gambar 1.3.** Komposisi Rasio Ketergantungan Kota Bima Tahun 2016

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA/ sederajat yang mencapai 40.595 jiwa atau 29 persen dari total penduduk. Data menunjukkan bahwa penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi hanya sebesar 10 persen. Sementara itu, angka penduduk yang tidak menempuh/ tidak tamat SD cukup tinggi yaitu 37 persen dan penduduk yang masih berpendidikan rendah 24 persen.



Gambar 1.4. Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir yang Ditamatkan Tahun 2016

Berdasarkan persebaran penduduk, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan jumlah kepadatan 2.835 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti Kecamatan Mpunda pada urutan kedua yakni 1.839 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya yakni 265 jiwa/km<sup>2</sup>.



Grafik 1.5. Kepadatan Penduduk Kota Bima Tahun 2016

### C. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bima dalam proses perencanaan daerah dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Tingkat partisipasi Instansi Pemerintah Propinsi, Lembaga Kemasyarakatan, Pihak Swasta, Serta Tokoh Masyarakat dalam memberikan informasi yang lengkap, jelas, cepat, tepat dan akurat masih belum maksimal. Hal ini mengakibatkan pengambilan kebijakan, penetapan program, pelaksanaan kegiatan masih kurang tepat, efisien, dan efektif dalam rangka peningkatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian jajaran Pemerintah Kota Bima dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik – baiknya dalam mewujudkan pemerintah yang baik, masih perlu di tingkatkan.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan masing-masing SKPD dan unit kerja, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kota Bima. dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kota Bima, masih belum maksimal.
4. Paradigma dan pola pikir beberapa aparatur pemerintah Kota Bima dalam pelaksanaan kegiatan masih berorientasi pada proses (belum berorientasi hasil) sehingga masih terdapat keinginan masyarakat kota bima dengan upaya dari aparatur Pemerintah Kota Bima belum sinkron.

## ***BAB II Perencanaan Kinerja***

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Bima tahun 2017 pada prinsipnya merupakan turunan dari hal-hal yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018. Pada hakekatnya, sasaran dan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bima diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018.

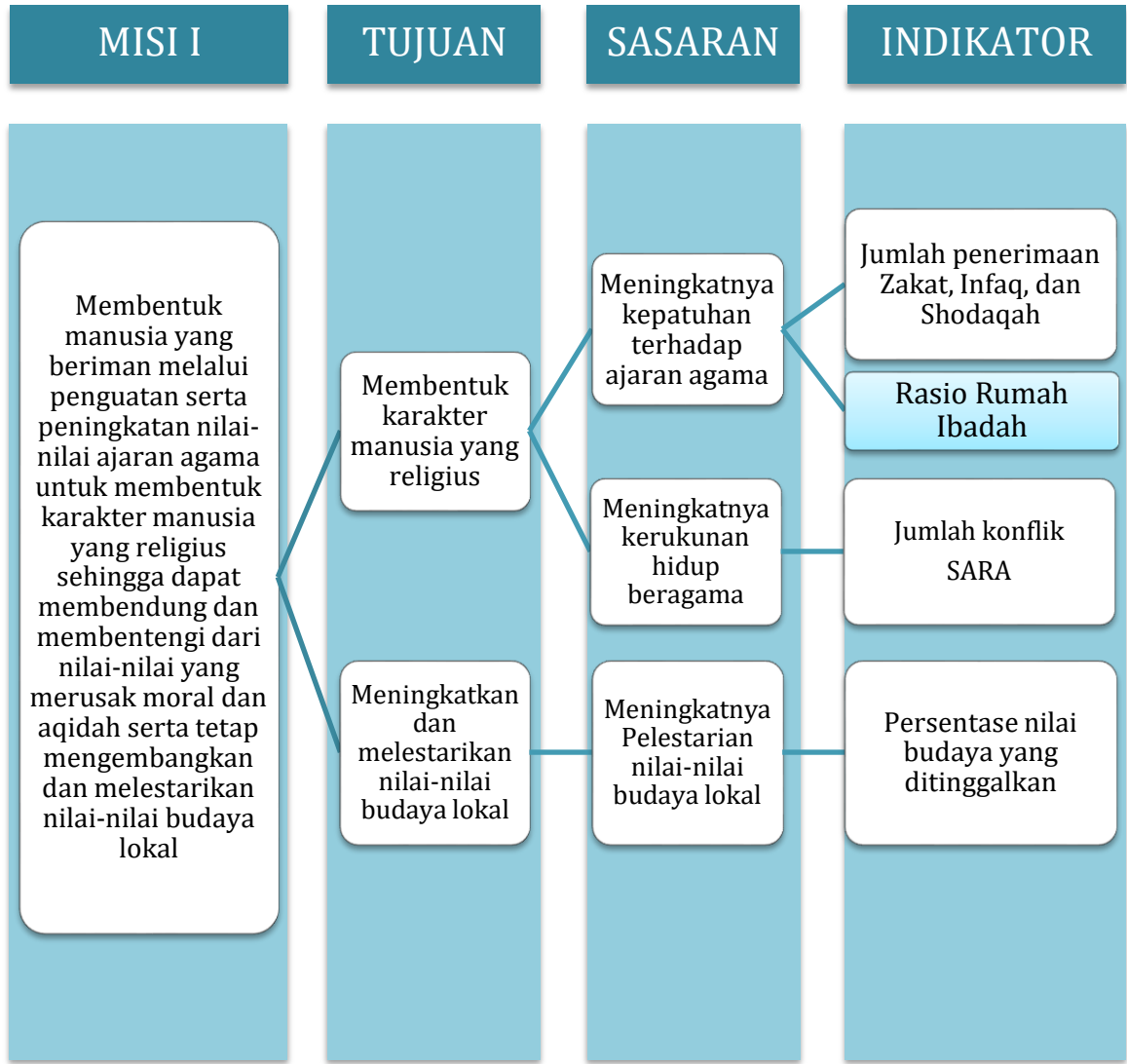
Visi jangka menengah daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA  
YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”.**

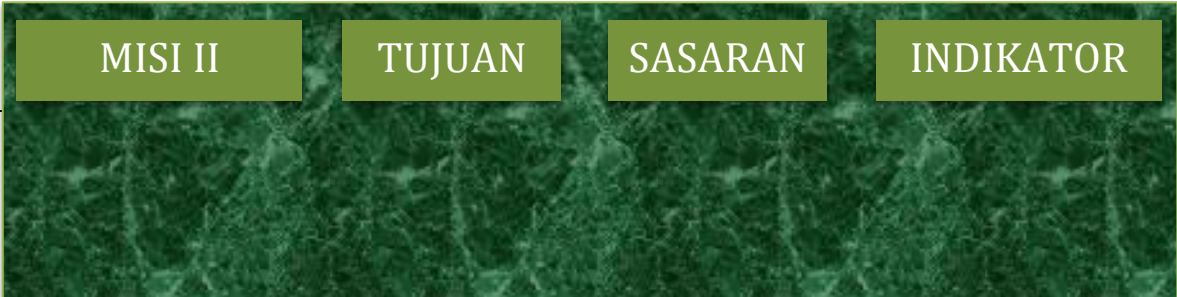
Rencana Pembangunan Kota Bima tahun 2013-2018, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kota Bima dalam segala bidang, guna menyiapkan kemajuan, kemandirian dan kemampuan bersaing. Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kota Bima yang beriman, maju, adil dan sejahtera tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) misi Kota Bima dalam rangka pencapaian visi Kota Bima 2013 – 2018.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi yang ada, dirumuskanlah kerangka yang jelas pada setiap misi, yang menyangkut tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran strategis pada setiap misi yang dioperasionalisasikan diharapkan mampu memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.

Secara lebih rinci, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama pada pelaksanaan masing-masing misi pembangunan Kota Bima dapat dilihat pada skema diagram-diagram di bawah ini.



Gambar 2.1. Bagan Operasionalisasi Misi I menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

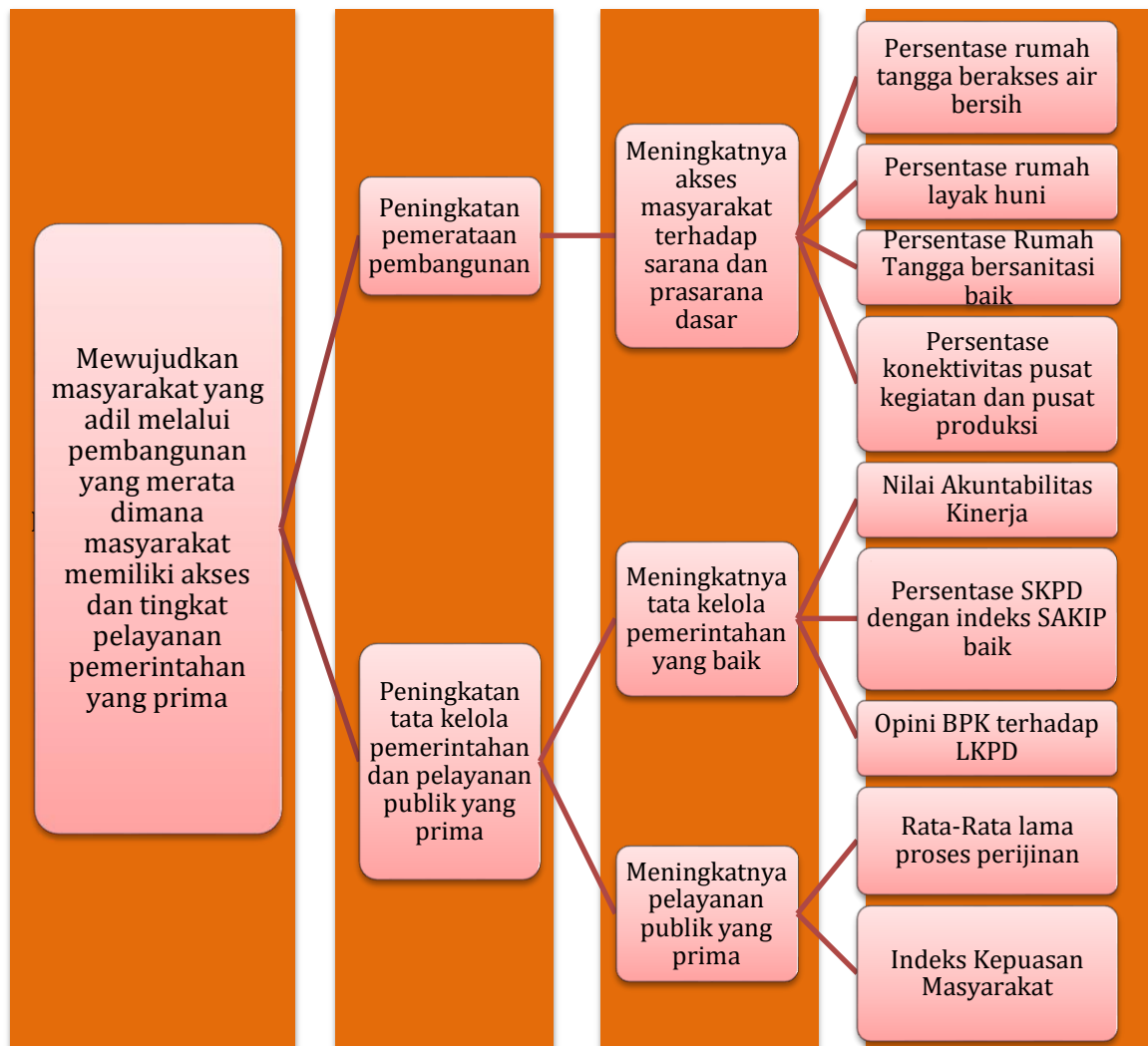




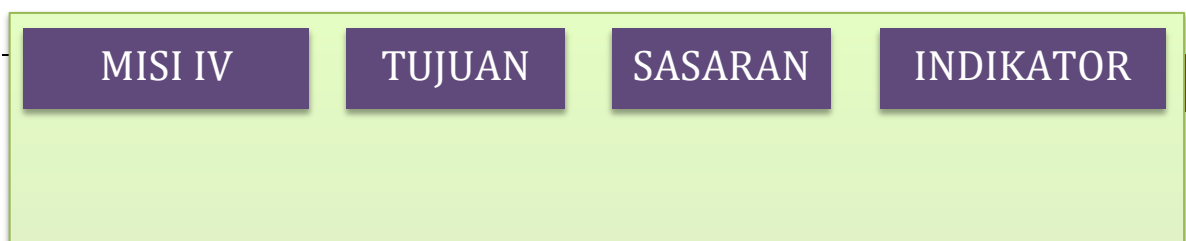
**Gambar 2.2.** Bagan Operasionalisasi Misi II menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

MISI III	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR

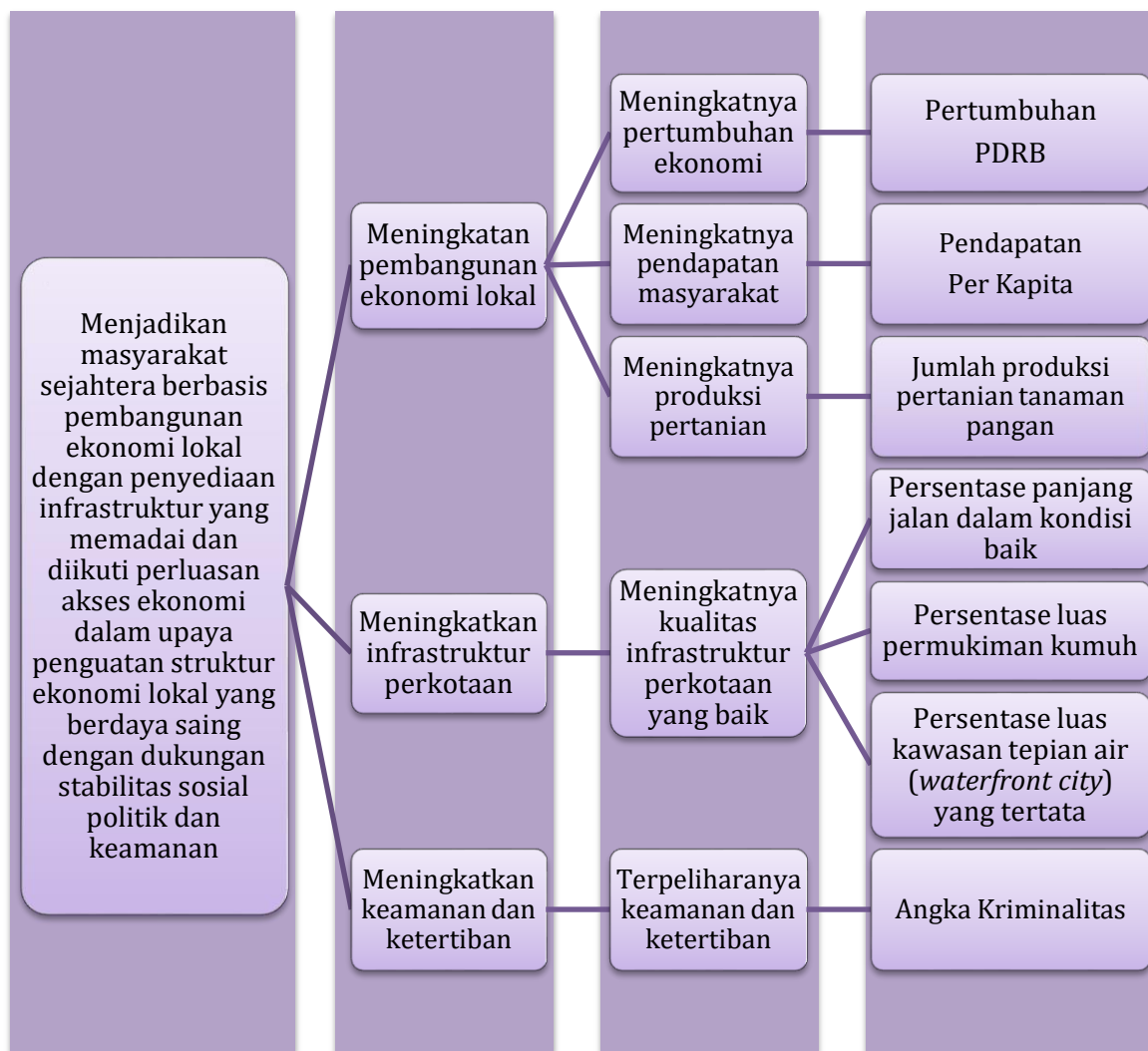




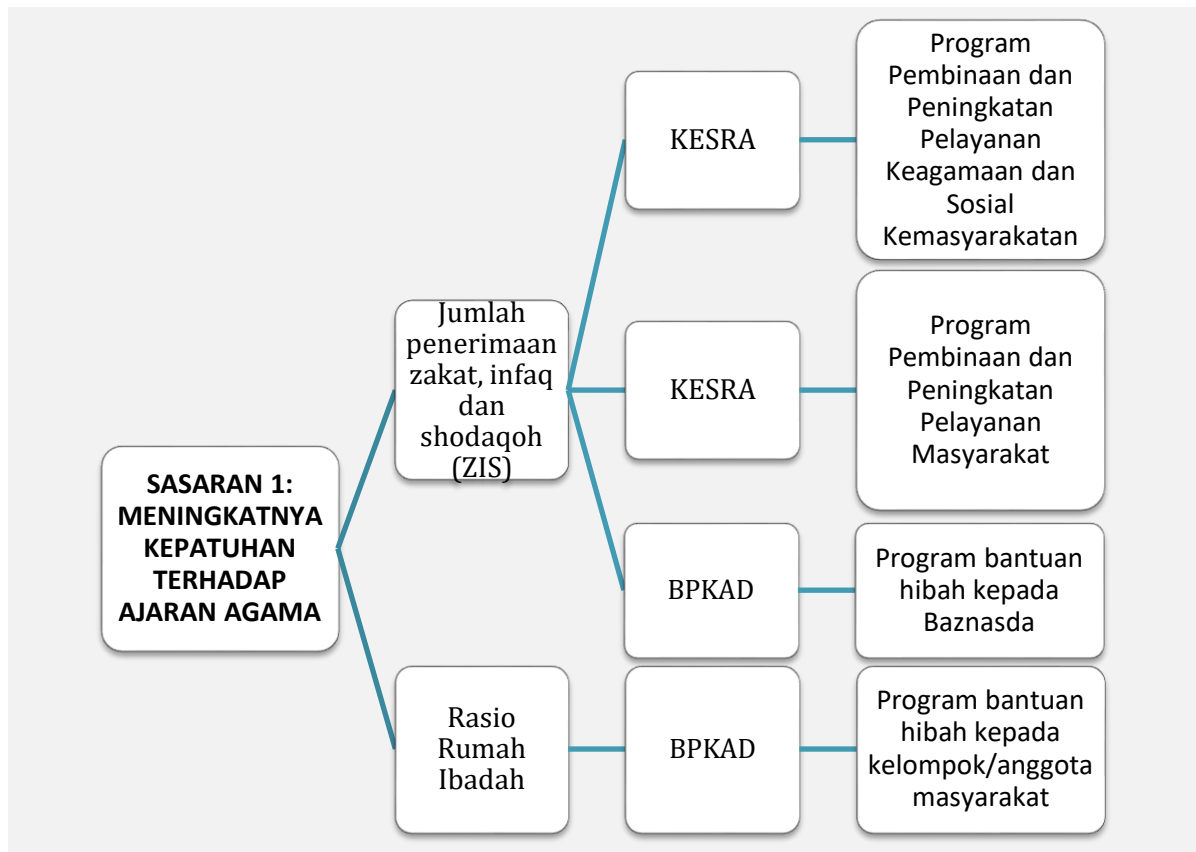
**Gambar 2.3..** Bagan Operasionalisasi Misi III menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja



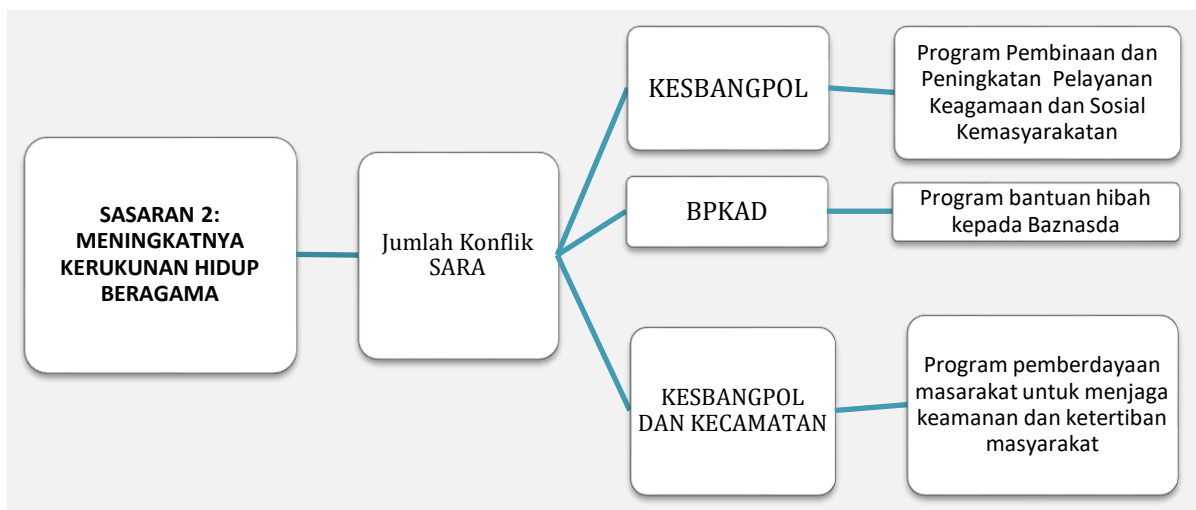




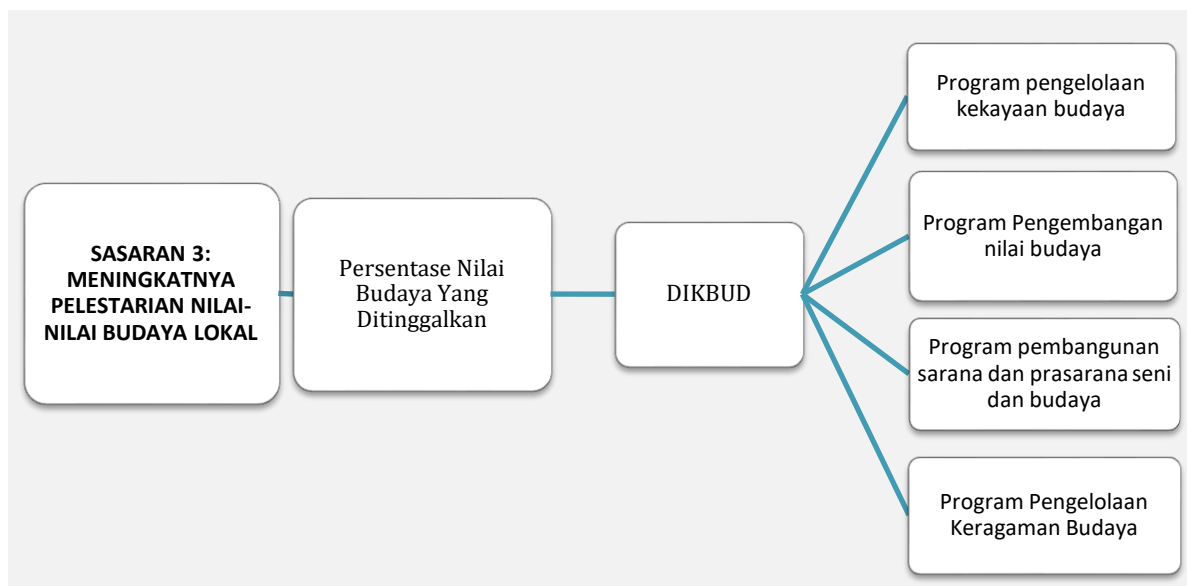
**Gambar 2.4.** Bagan Operasionalisasi Misi IV menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja



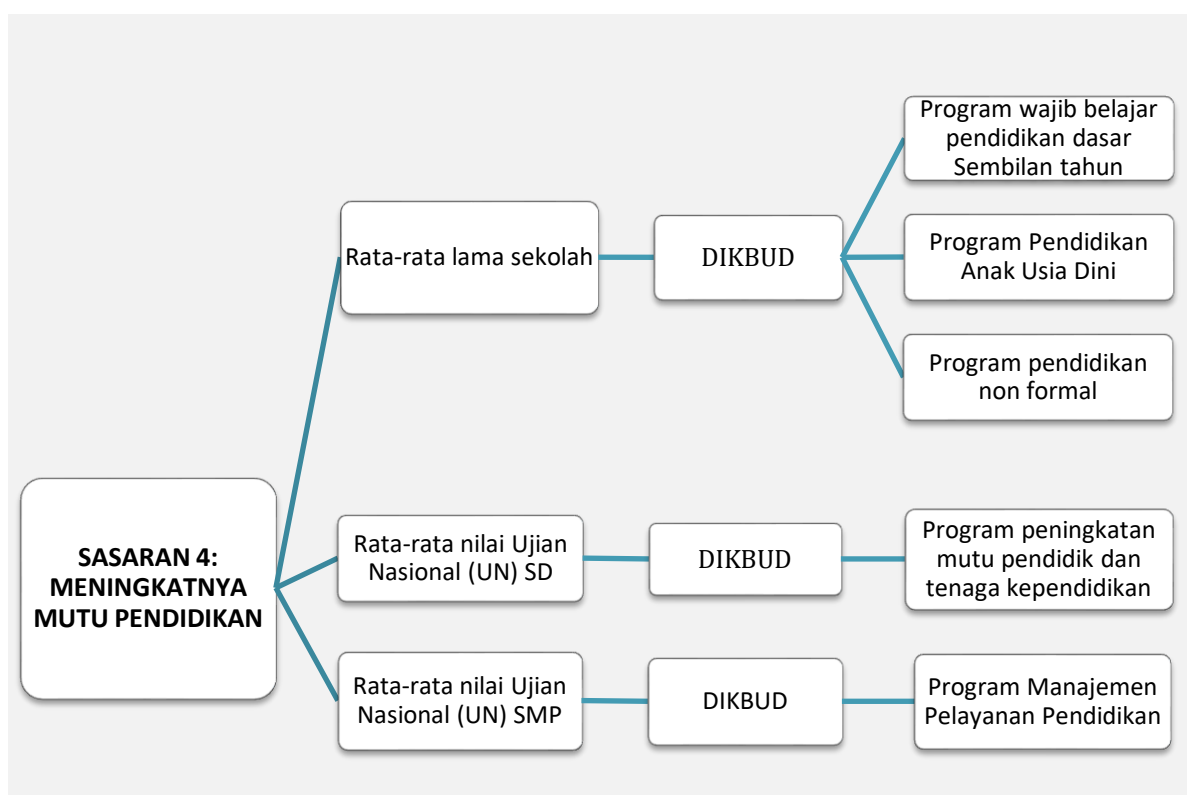
**Gambar 2.5.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 1, Indikator Kinerja dan Program Prioritas



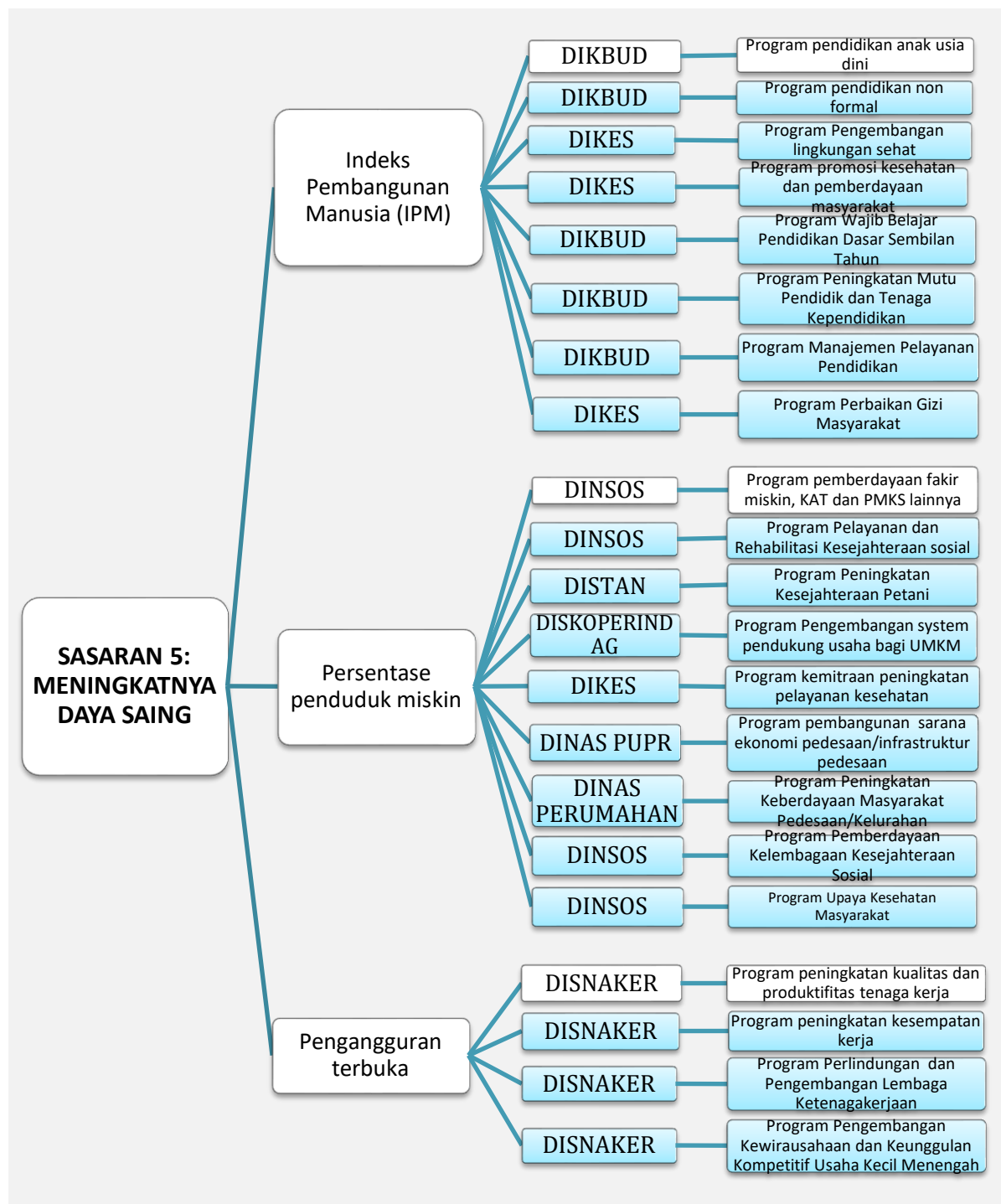
**Gambar 2.6.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 2, Indikator Kinerja dan Program Prioritas



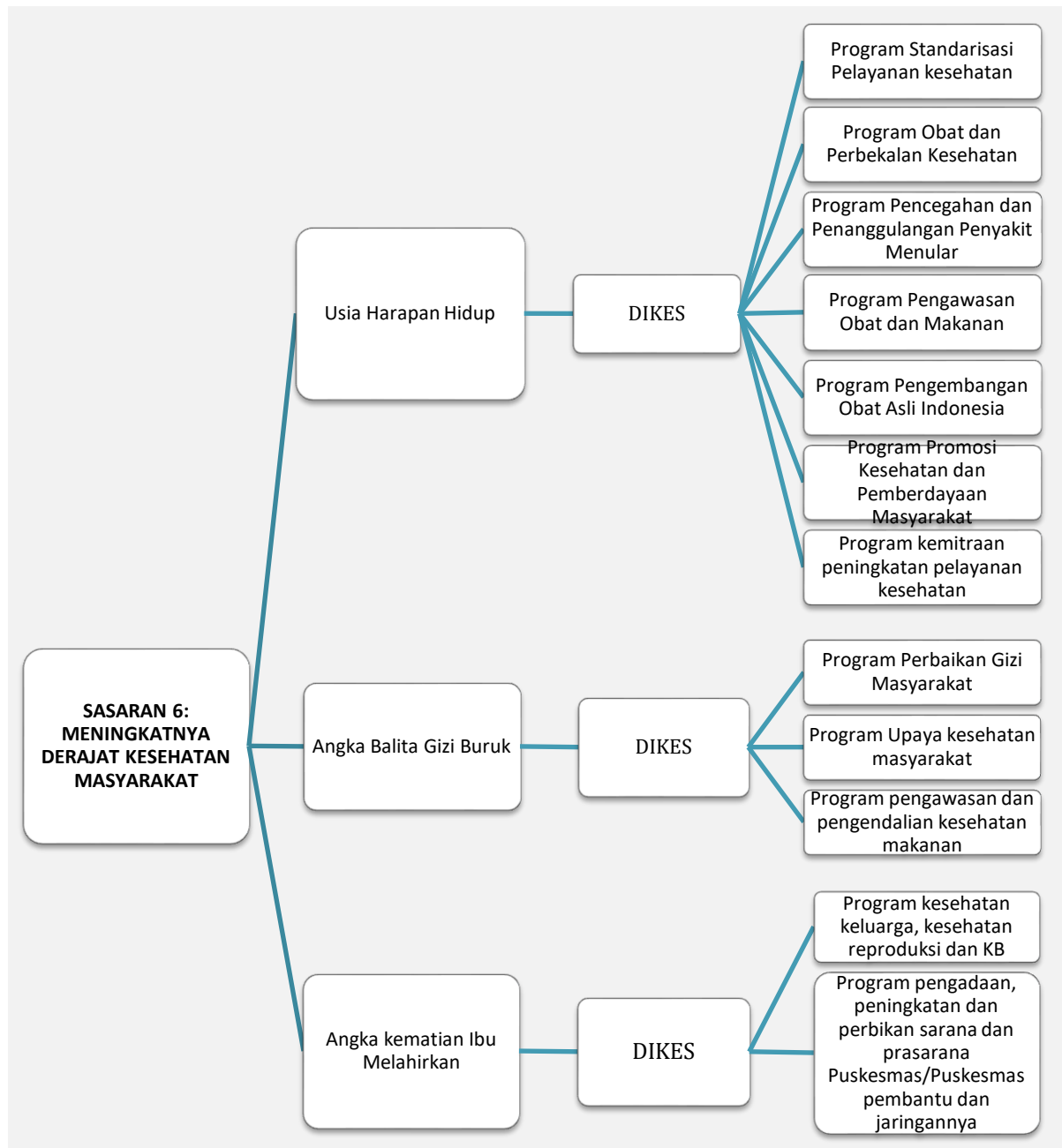
**Gambar 2.7.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 3, Indikator Kinerja dan Program Prioritas



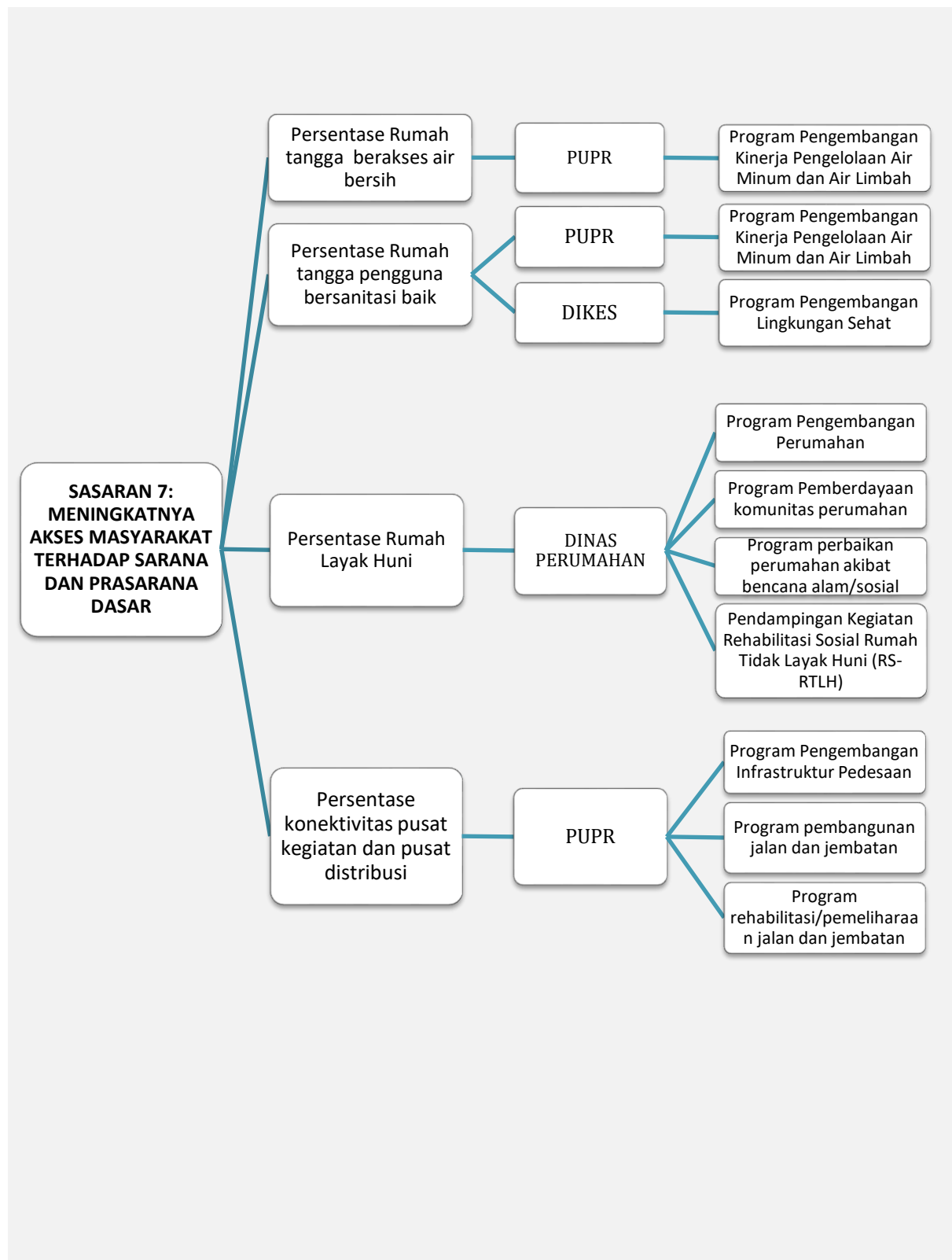
**Gambar 2.8.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 4, Indikator Kinerja dan Program Prioritas



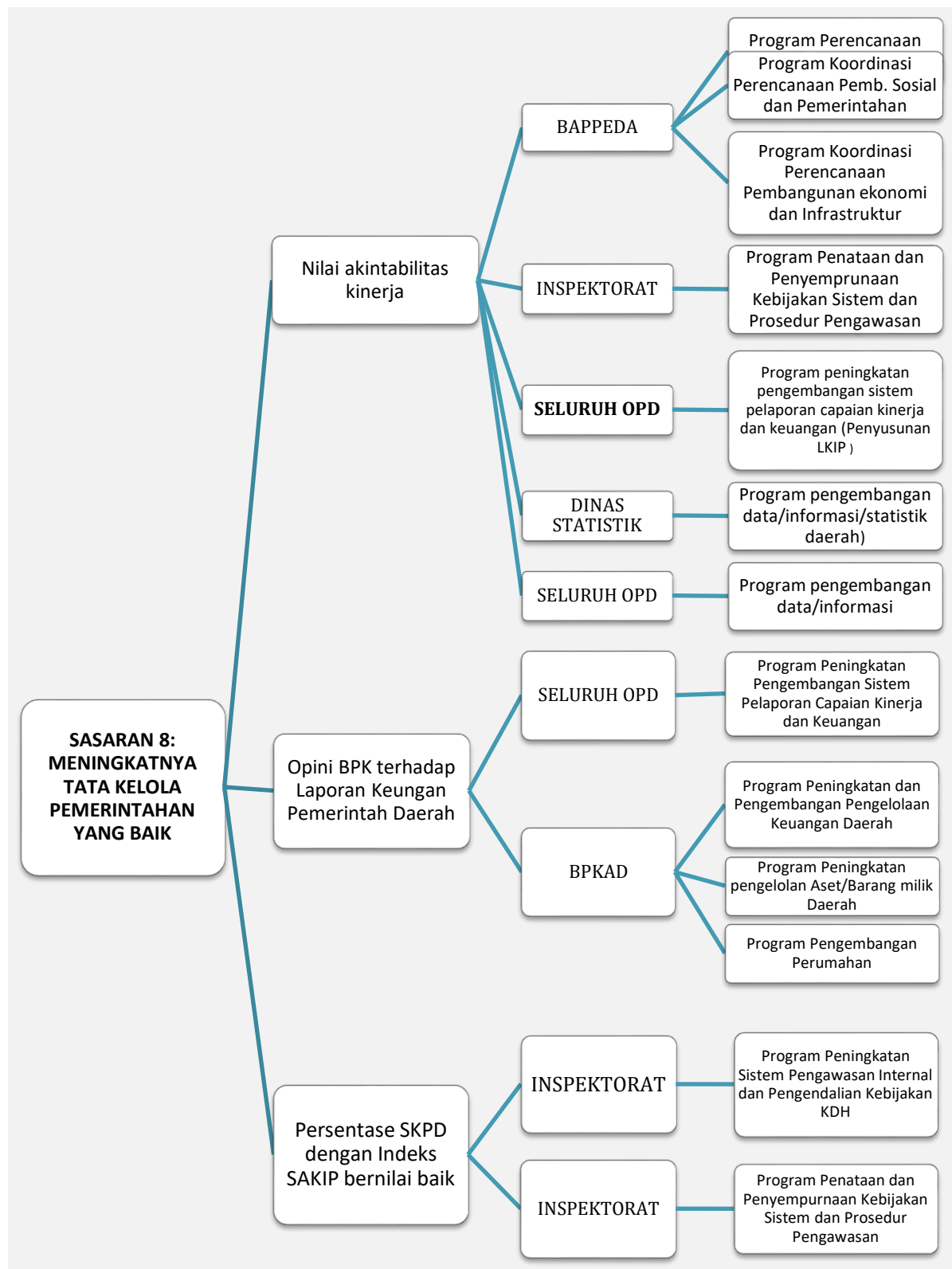
**Gambar 2.9.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 5, Indikator Kinerja dan Program Prioritas



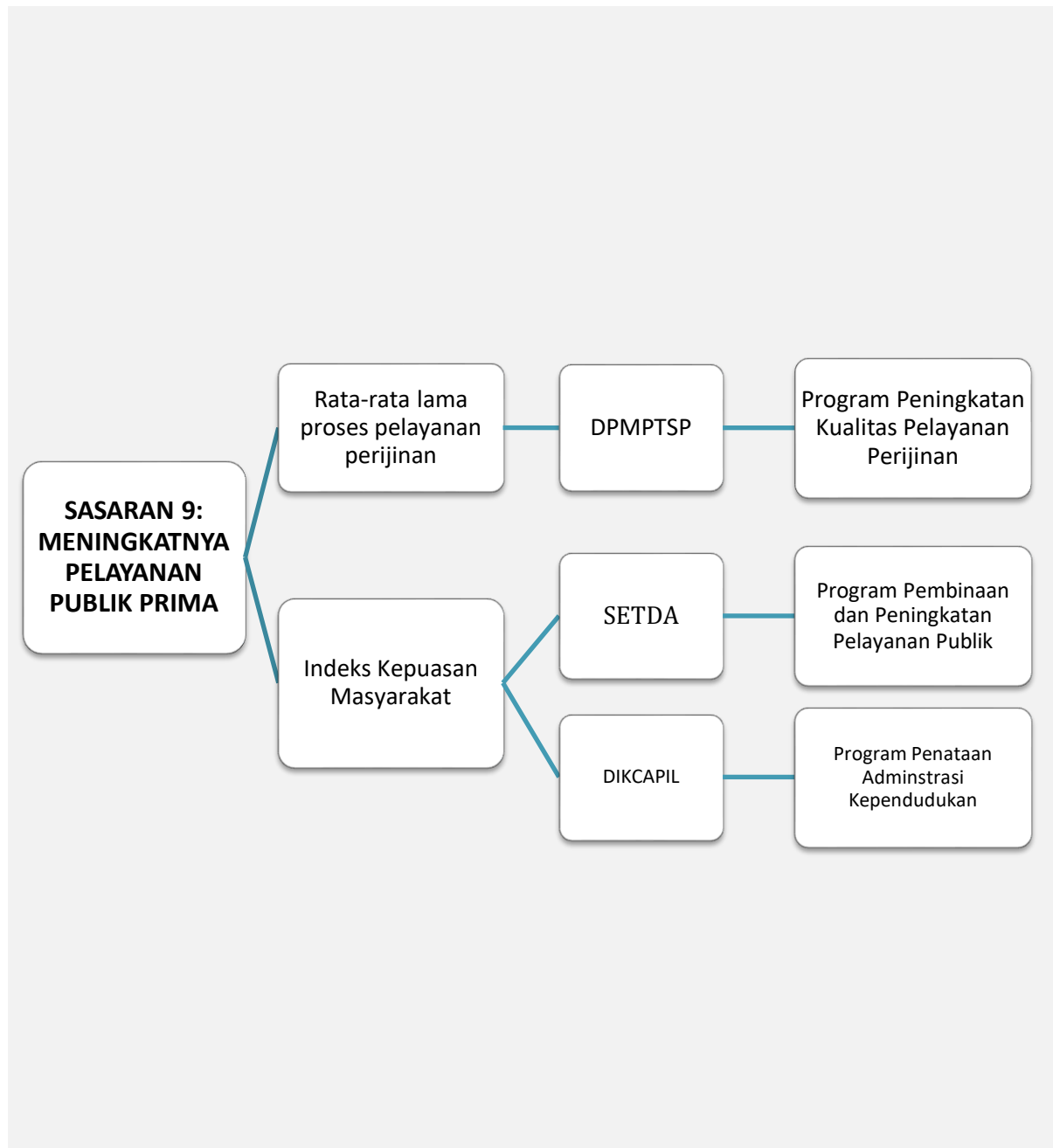
**Gambar 2.10.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 6, Indikator Kinerja dan Program Prioritas



**Gambar 2.11.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 7, Indikator Kinerja dan Program Prioritas

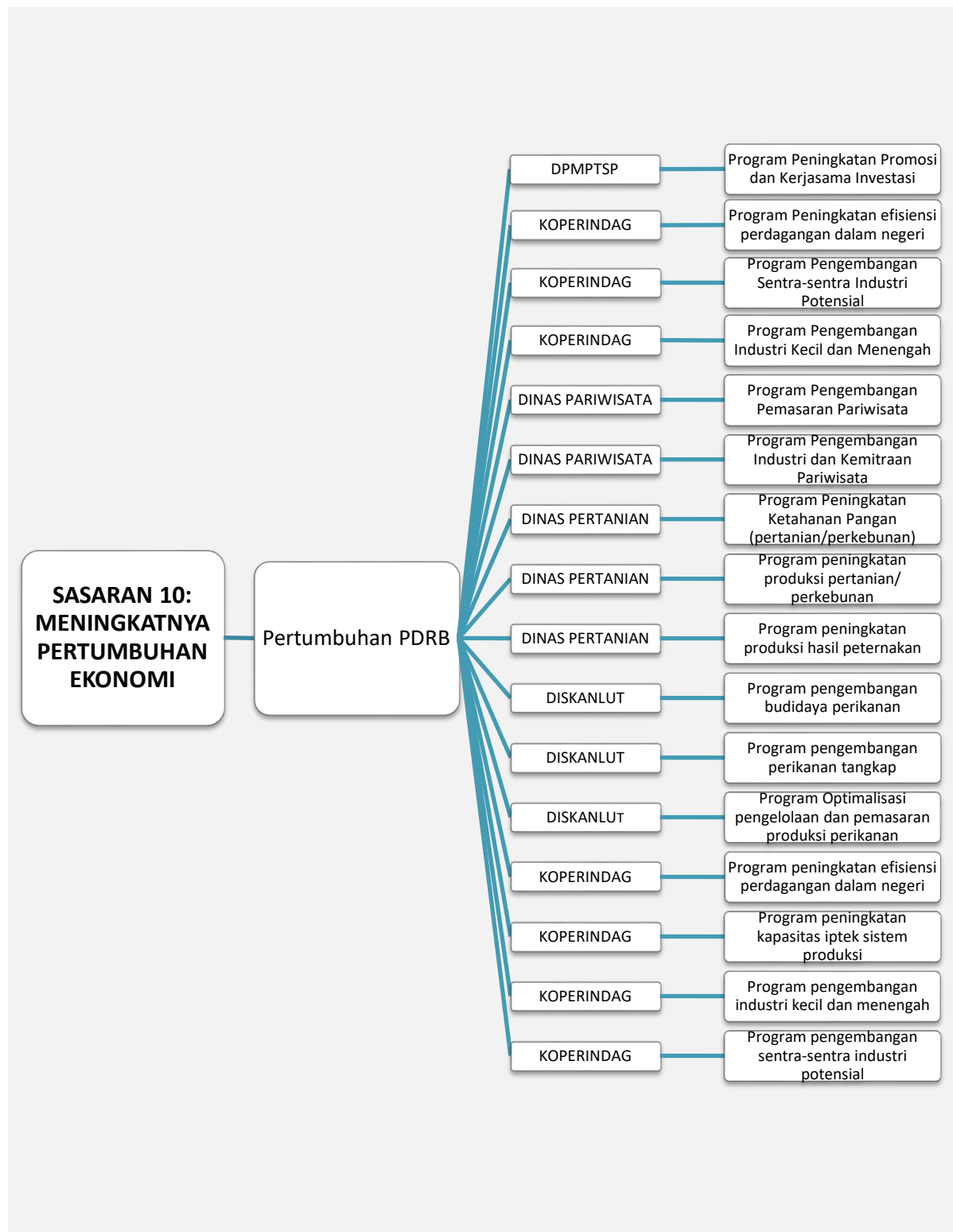


**Gambar 2.12.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 8, Indikator Kinerja dan Program Prioritas

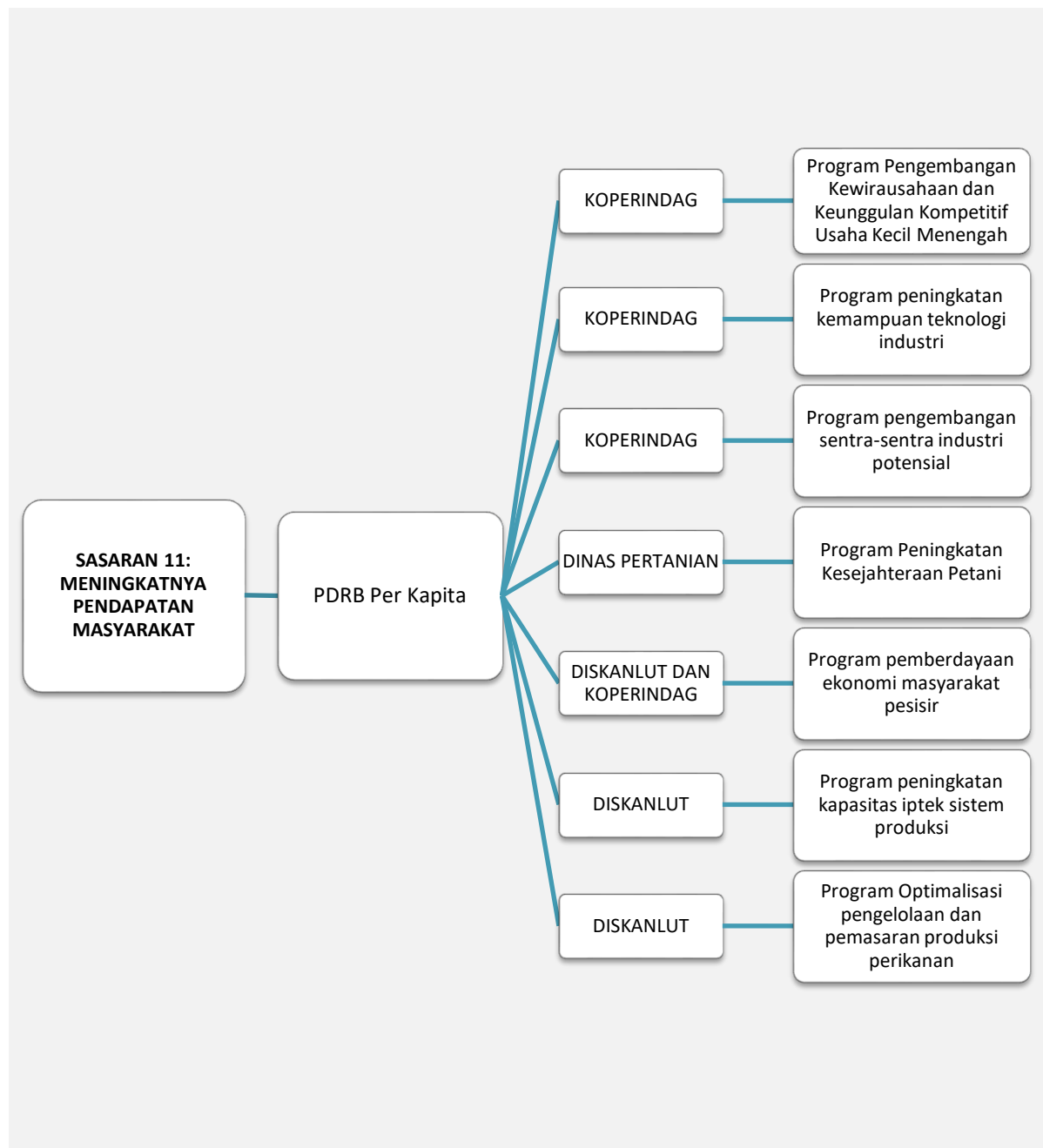


**Gambar 2.13.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 9, Indikator Kinerja dan Program Prioritas

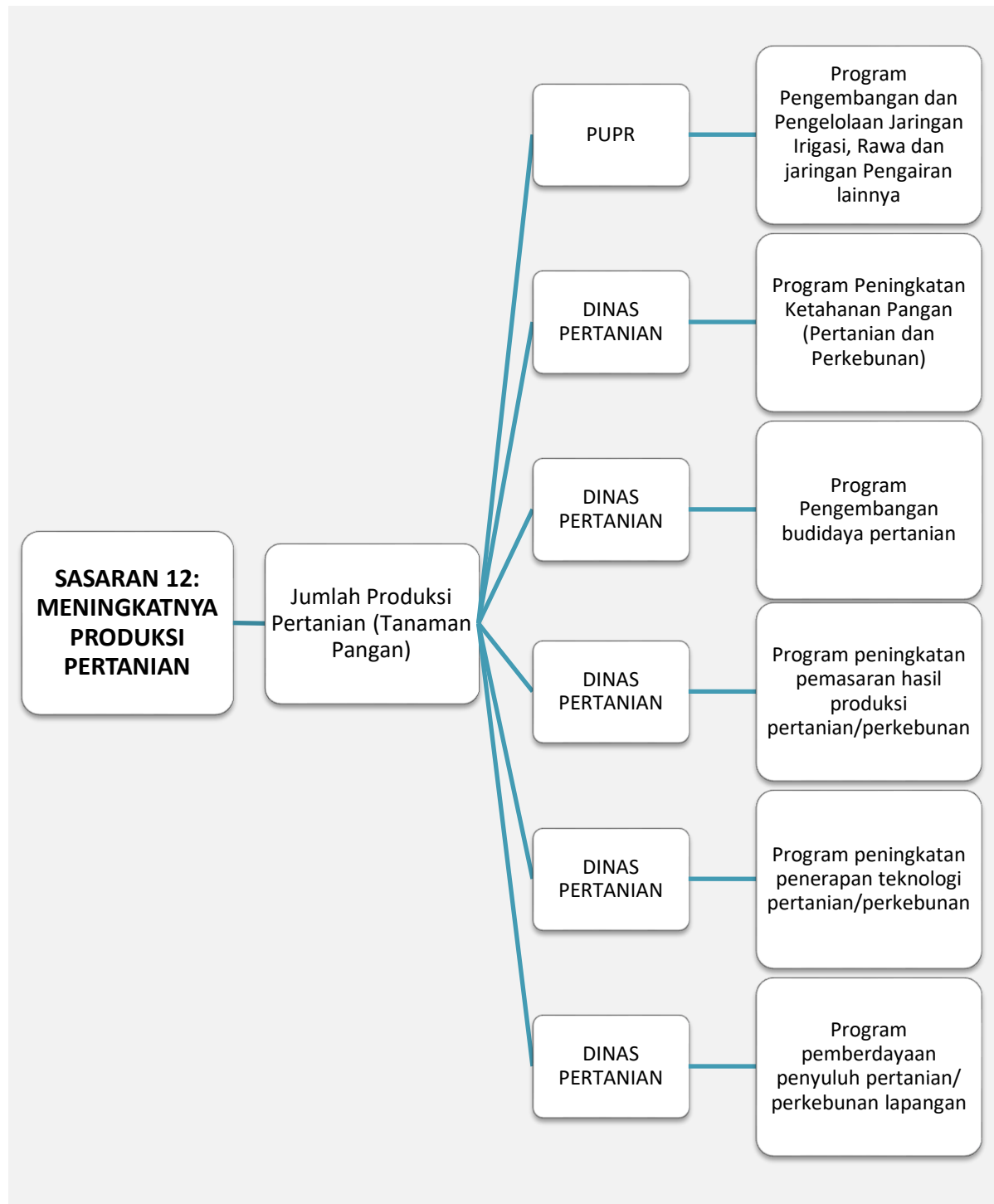




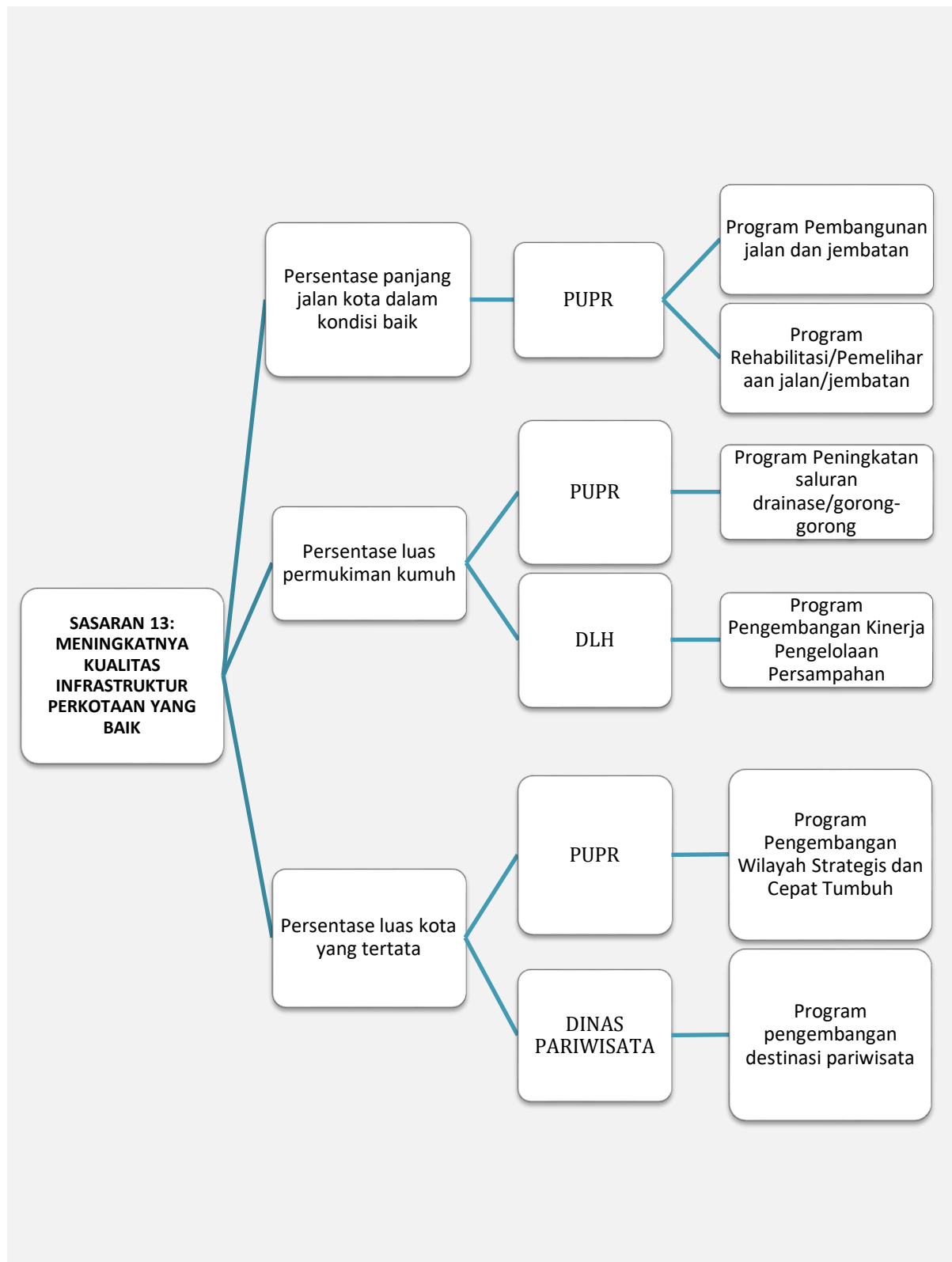
**Gambar 2.14.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 10, Indikator Kinerja dan Program Prioritas



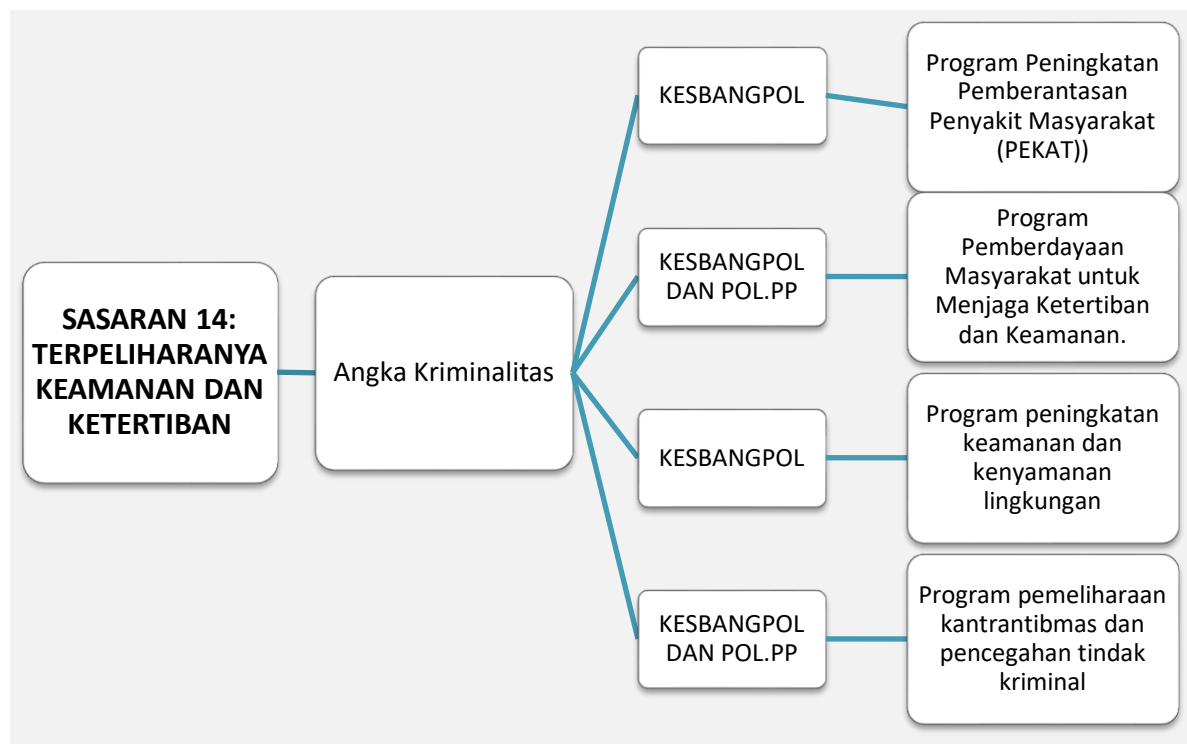
**Gambar 2.15.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 11, Indikator Kinerja dan Program Prioritas



**Gambar 2.16.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 12, Indikator Kinerja dan Program Prioritas



**Gambar 2.17.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 13, Indikator Kinerja dan Program Prioritas



**Gambar 2.18.** Bagan Operasionalisasi Sasaran 14, Indikator Kinerja dan Program Prioritas

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 tersebut, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun anggaran 2017 yang memuat pernyataan Walikota Bima dengan mencantumkan 14 (empat belas) sasaran strategis dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja utama.

Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2017 tersebut menguraikan sasaran-sasaran strategis yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2017, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Uraian yang lebih rinci tentang Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Bima tahun 2017 yang memuat Sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerja disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)	Rupiah	4 milyar
		Rasio rumah ibadah	Per 1.000 penduduk	3
2.	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	Kasus	0
3.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Persentase nilai budaya yang ditinggalkan	%	5,00
4.	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,00
		Rata-rata nilai UN	Nilai	5,50
5.	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,00
		Persentase penduduk miskin	%	9,00
		Pengangguran terbuka	%	7,50
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,15
		Angka Balita Gizi Buruk	%	3,00
		Angka kematian ibu melahirkan	Per 100.000 kelahiran hidup	0,00
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	%	90,00
		Persentase Rumah Layak Huni	%	92,50
		Persentase Rumah Tangga bersanitasi baik	%	90,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	%	100,00
8.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	65,01
		Persentase SKPD dengan indeks SAKIP baik	%	80,00
		Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP
9.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	hari	1,25
		Indeks kepuasan masyarakat	indeks	3,00
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	6,00
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	14,80
12	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan	ton	55.000
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	75,00
		Persentase luas permukiman kumuh	%	7,00
		Persentase luas kawasan tepian air ( <i>waterfront city</i> ) yang tertata	%	10,00
14.	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	%	97,50

## ***BAB III Akuntabilitas Kinerja***

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bima.

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.1. Skala Ordinal sebagai Perangkat Penilaian**

<b>No.</b>	<b>Jumlah Nilai</b>	<b>Kategori</b>
1.	85 sampai dengan 100	Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang Berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

### **A. Capaian Kinerja**

Penyajian capaian kinerja Pemerintah Kota Bima, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2017, membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016, membandingkan dengan target akhir tahun perencanaan RPJMD, membandingkan dengan kondisi dan standar nasional serta dengan melakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja disertai alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kategori keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2017, disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 3.2. Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2017**

No.	Kategori	Sasaran	Persentase Capaian
1.	Berhasil	13	92,86%
2.	Cukup Berhasil	1	7,14 %
3.	Kurang Berhasil	0	0,00 %
4.	Tidak Berhasil	0	0,00 %

Dari capaian indikator kinerja yang dihasilkan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 dikategorikan berhasil sebesar 92,86% dan yang cukup berhasil sebesar 7,14%. Rincian pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut dideskripsikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Strategis Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	108,72
2.	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	100,00
3.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	100,00
4.	Meningkatnya mutu pendidikan	107,42
5.	Meningkatnya daya saing	93,31
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	91,72
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	102,15
8.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	107,09
9.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	100,63
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	96,33
11.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	106,89
12.	Meningkatnya produksi pertanian	104,31
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	94,64
14.	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	72,83

Dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase capaian 14 sasaran tersebut sebesar 99,00%. Persentase capaian

terendah adalah Sasaran Strategis ke-14, yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban yakni sebesar 72,83%. Adapun persentase capaian tertinggi dicatatkan oleh Sasaran Strategis ke-1, yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama yang mencapai angka 108,72%.

Kategori keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2017, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.4. Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2017**

No.	Kategori	Indikator Kinerja	Persentase Capaian
1.	Berhasil	26	89,66 %
2.	Cukup Berhasil	3	10,34 %
3.	Kurang Berhasil	-	-
4.	Tidak Berhasil	-	-
<b>Jumlah</b>		29	100,00 %

Capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2017 dikategorikan 89,29% berhasil tercapai, 10,34% cukup berhasil. Berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2017 dan realisasi kinerja pada tahun 2017, maka capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran dijelaskan sebagaimana termuat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5. Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)	Rupiah	4.000.000.000	4.230.456.000	105,76
		Rasio Rumah Ibadah	Per 1.000 penduduk	3	3,35	111,67
2	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	kasus	0	0	100,00
3	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Persentase nilai budaya yang ditinggalkan	%	5,00	5,00	100,00
4	Meningkatnya	Rata-rata lama	tahun	10,00	10,13	101,13

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	mutu pendidikan	sekolah				
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SD	nilai	5,50	7,25	131,81
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMP	nilai	5,50	4,7	85,46
5	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	73	73,67	100,92
		Persentase penduduk miskin	%	9,30	9,27	100,32
		Pengangguran terbuka	%	7,50	8,89	84,36
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	69,15	69,35	100,29
		Angka Balita Gizi Buruk	%	0,075	0,078	96,15
		Angka kematian ibu melahirkan	Per 100.000 kelahiran hidup	148	188	78,72
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Rumah tangga pengguna berakses air bersih	%	90,00	93,25	103,61
		Persentase Rumah Layak Huni	%	92,50	91,30	98,70
		Rumah tangga pengguna bersanitasi baik	%	90	96,92	107,69
		Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat distribusi	%	100,00	98,61	98,61
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai	65,00	62,58	96,28
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100,00
		Persentase SKPD dengan Indeks SAKIP bernilai baik	%	80	100	125,00
9	Meningkatnya pelayanan publik prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	hari	1,25	1,25	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
		Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	81,00	101,25
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	5,70	5,78	101,40
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	14,80	15,82	106,89
12	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan)	ton	55.000	57.371	104,31
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	75,00	76,18	101,57
		Persentase luas permukiman kumuh	%	29,56	32,06	108,45
		Persentase luas kota yang tertata	%	10,00	7,39	73,90
14	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	%	97,50	133,87	72,83

Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2017 pada tabel di atas, rata-rata persentase capaian adalah sebesar 99,66%, dengan nilai persentase capaian terendah sebesar 72,88% yaitu pada capaian indikator kinerja angka kriminalitas, dan capaian persentase tertinggi adalah sebesar 131,81% yaitu pada capaian indikator kinerja rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) SD.

Pencapaian masing-masing indikator kinerja tersebut, didukung oleh sejumlah program dan kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan berikut kendala/hambatan, upaya dan dukungan yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dideskripsikan sebagai berikut.

#### 1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kepatuhan terhadap Ajaran Agama

Pencapaian sasaran strategis ini diimplementasikan ke dalam dua indikator kinerja utama yaitu jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dan indikator rasio rumah ibadah. Pada awal tahun 2017, telah ditetapkan target jumlah penerimaan ZIS yang tertuang dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Bima

sebesar 4 milyar rupiah dan berhasil melampaui target, yaitu sebesar Rp. 4.230.456.000 atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,7%. Adapun pencapaian pada tahun 2016 memenuhi capaian hingga 108,39%, yaitu dari target Rp. 4000.000.000,00 ; sedangkan pada tahun 2015, capaian kinerja indikator ini sebesar 185,51% dari target sebesar Rp.750.000.000,00.. Kemudian pada tahun 2014 tercapai sebesar 104,67%; dari target sebesar Rp.750.000.000,00.

**Tabel 3.6. Capaian Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Tahun 2014-2017**

<b>Tahun Capaian Kinerja</b>	<b>Target (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>% Capaian</b>
Tahun 2014	750.000.000	785.000.000	104,67%
Tahun 2015	750.000.000	1.391.336.000	185,51%
Tahun 2016	4.000.000.000	4.335.858.840	108,39%
Tahun 2017	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.230.456.000</b>	<b>105,7%.</b>

*Sumber : Bagian Kesra Setda Kota Bima, 2017*

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penerimaan jumlah zakat, infaq dan shodaqoh tahun 2017 sedikit menurun dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya orang atau dermawan yang menyetorkan zakat mal maupun infaq disebabkan oleh kebutuhan setiap individu yang cukup tinggi untuk kebutuhan penanganan pasca banjir bandang yang terjadi diakhir tahun 2016 di Kota Bima. Namun demikian, sosialisasi kepada para dermawan khususnya dan masyarakat Kota Bima pada umumnya tentang pentingnya berzakat, infaq dan sedekah semakin intens dilaksanakan. Capaian kinerja tahun 2017 ini apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kota Bima pada tahun 2018 sebesar 4 milyar rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja sampai tahun 2017 telah melampaui target RPJMD pada tahun 2018 dengan tingkat capaian 105,7%.

Kemudian indikator kinerja Rasio Rumah Ibadah pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 3 per 1000 jumlah penduduk, dan berhasil dicapai sebesar 3,35 per 1000 jumlah penduduk atau dengan tingkat capaian 111,67%.

**Tabel 3.7. Capaian Kinerja Rasio Rumah Ibadah Tahun 2014-2017**

<b>Tahun Capaian Kinerja</b>	<b>Target (per 1000 penduduk)</b>	<b>Realisasi (per 1000 penduduk)</b>	<b>% Capaian</b>
Tahun 2014	2,7	2,66	98,52
Tahun 2015	2,9	2,85	98,28
Tahun 2016	3	3	100
Tahun 2017	<b>3</b>	<b>3,35</b>	<b>111,67</b>

Sumber : Bagian Kesra Setda Kota Bima, 2018

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa rasio rumah ibadah pada tahun 2017 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh makin meningkatnya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan pembangunan rumah ibadah di Kota Bima, baik dari Pemerintah Kota Bima, Hibah dari Pemerintah Daerah lain, maupun swadaya masyarakat, Lebih khusus lagi Pemerintah Kota Bima membangun Masjid terapung yang berada di kawasan strategis pantai Amahami. Capaian kinerja tahun 2017 3,35 per 1000 jumlah penduduk ini juga sudah melampaui target RPJMD Kota Bima tahun 2018 yang hanya sebesar 3 per 1000 jumlah penduduk.

Capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh beberapa program pembangunan sebagai berikut:

1. Program belanja hibah kepada organisasi keagamaan (Baznasda)
2. Program belanja hibah kepada masjid mushola
3. Program belanja hibah kepada yayasan almuwahidin
4. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, maka dapat disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia (meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia maupun sumberdaya kelembagaan) telah dipergunakan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini.

## **2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama**

Sasaran strategis Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama diukur melalui satu indikator kinerja utama yaitu jumlah konflik SARA yang terjadi. Seperti diketahui bahwa konflik yang bernuansa SARA sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Hal ini telah banyak mempengaruhi

situasi psikologis dan sosiologis keagamaan masyarakat, sehingga dikhawatirkan antara kelompok agama akan diliputi perasaan tidak aman dan tidak nyaman. Dengan demikian, merupakan sesuatu hal yang penting untuk tetap menjaga persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan kebangsaan.

Kerukunan umat beragama adalah merupakan bagian dari kerukunan nasional. Ia menjadi inti dari kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam masyarakat. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kerukunan atau keharmonisan hidup beragama tersebut adalah proses dan suasana kehidupan beragama dari umat dan pemeluk agama yang plural secara serasi dalam kehidupan bangsa, dimana agama-agama yang berbeda dapat dapat diamalkan oleh pemeluknya tanpa berbenturan satu dengan lain.

Meskipun Kota Bima dilabelkan sebagai zona merah yang rentan terhadap konflik sara dan terorisme, namun kenyataannya bahwa pada tahun 2017 tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kota Bima. Sehingga capaian indikator kinerja sasaran ini tercapai 100%. Capaian tahun 2017 ini mempertahankan capaian tahun 2014-2016 yang juga tidak terjadi kasus konflik bernuansa SARA di Kota Bima.

**Tabel 3.8. Capaian Kinerja Jumlah Konflik SARA yang terjadi di Kota Bima**

<b>Tahun Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Tahun 2014	0 kasus	0 kasus	100,00%
Tahun 2015	0 kasus	0 kasus	100,00%
Tahun 2016	0 kasus	0 kasus	100,00%
<b>Tahun 2017</b>	<b>0 kasus</b>	<b>0 kasus</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Badan Kesbangpol Kota Bima, 2018*

Keberhasilan Pemerintah Kota Bima untuk memelihara kerukunan umat beragama ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Bima yang senantiasa membangun, mempertahankan, memperkuat dan melestariakan kerukunan umat beragama dengan berupaya melakukan beberapa program atau agenda penting; diantaranya adalah melalui pemberdayaan forum kerukunan umat beragama.

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dibentuk oleh unsur-unsur pemuka agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bima. Tugasnya adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2017, antara lain:

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan
2. Belanja hibah untuk organisasi keagamaan FKUB.

Terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, maka dapat disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia (meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia maupun sumberdaya kelembagaan) telah dipergunakan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini.

### **3. Sasaran Strategis Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal**

Nilai-nilai kearifan lokal tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Salah satu indikator penting untuk mengukur pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal ke dalam persentase nilai budaya yang ditinggalkan. Indikator ini dipilih sebagai indikator sasaran strategis kota mengingat terus meningkatnya kecenderungan pergeseran nilai adat budaya dan kearifan lokal yang ditinggalkan. Sebagai contoh dalam masyarakat di tengah-tengah kampung, yang dahulu kalau ada musyawarah kampung yang dikenal dengan istilah “Mbolo Kampo atau Mbolo Rasa” dalam rangka pernikahan atau hajatan salah satu warga kampung, maka warga tidak perlu diundang secara resmi tapi cukup diumumkan melalui masjid dan musholla. Dengan pengumuman tersebut warga akan berduyun-duyun datang dengan membawa buah tangan sebagai sumbangan atau kontribusi untuk membantu meringankan beban keluarga yang berhajat. Bentuk sumbangan tersebut adalah



lebih dominan dalam bentuk barang seperti beras, gula, kopi, kayu bakar dan lain sebagainya. Namun sekarang banyak dijumpai di kampung-kampung Mbolo kampo menggunakan undangan resmi dan sumbangan warga sudah ditetapkan besarnya dalam bentuk uang sesuai kesepakatan masing-masing RT atau RW serta kebersamaan warga sudah semakin berkurang.

Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2017, terdapat 40 pranata adat yang masih lestari yang meliputi tradisi-tradisi, termasuk daur hidup, tarian dan tradisi sosial keagamaan sedangkan tradisi yang ditinggalkan ada 2 jenis. Dengan demikian persentase nilai budaya yang ditinggalkan sebesar 5% pada tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini lebih baik dibandingkan tahun 2016 dimana terdapat 3 tradisi budaya yang ditinggalkan yaitu Raju, cepe kanefe, dan arugele sagele. Sedangkan nilai budaya atau tradisi yang masih lestari sebanyak 39 pranata adat. Dengan demikian persentase nilai budaya yang ditinggalkan pada tahun 2016 sebesar 7,69%. Arugele sagele pada tahun 2017 dapat dihidupkan kembali berkat upaya lembaga Makembo yang menggerakkan masyarakat petani di Ncai Kapenta Kelurahan Jatibaru untuk melaksanakan tradisi tersebut pada waktu menanam.

**Tabel 3.9. Capaian Kinerja Persentase Nilai Budaya yang ditinggalkan**

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2016	5%	7,69%	65,02%
Tahun 2017	5%	5 %	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, 2018

**Tabel 3.10. Tradisi dan Nilai Budaya yang masih Lestari**

No	Daftar Tradisi yang masih lestari	Daftar Tradisi yang hampir punah dan ditinggalkan	Keterangan
1	Cafi sari boru ro dore	Raju	
2	Compo sampari	Cepe kanefe	
3	Compo baju		
4	Tekara nee		
5	Waa coi/Terima Coi		
6	Jambuta		

7	Kiri loko	
8	Ngaji made	
9	Mbolo rasa	
10	Kapanca	
11	Kalondo wei	
12	Boho oi ndeu	
13	Hanta ua pua	
14	Lenggo	
15	Mpaa gantao	
16	Ndiri biola	
17	Ngaha karedo	
18	Ampa fare	
19	Arugele Sagele	
20	Bela leha	
21	Kolondo lopi	
22	Muna cepe rahi	
23	Soka	
24	Doa oma	
25	Doa soro olo	
26	Hadrah rebana	
27	Ntumbu Parise	
28	Doa bola	
29	Khata Karoa	
30	Mpaa sampari	
31	Tumba kambata	
32	Buja kadanda	
33	Ziki rati	
34	Mpaa peda	
35	Doa Rasu	
36	Kasaro	
37	Tumba kambata	

38	Mpaa toja	
39	Ngaji tua	
40	Ncala lanca	
	40	2

*Sumber: Lembaga Adat Makembo, 2018*

Eksistensi sejumlah pranata adat budaya di Kota Bima menunjukkan sinyal positif dalam rangka upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Bahkan pada tahun 2017 juga telah dibangun Gedung Budaya yang cukup representative yang mencirikan budaya masyarakat Bima.

Pemerintah Kota Bima terus berupaya memelihara keberadaan pranata adat dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya lokal, yang didukung dengan adanya fakta bahwa budaya lokal Bima merupakan aset yang tidak dapat disamakan dengan budaya lokal di daerah lain karena memiliki kekhasan tersendiri. Meskipun demikian, terdapat pula sejumlah kendala sekaligus sebagai tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Bima dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal, antara lain :

- kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini masih terbilang minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman.
- Pembelajaran tentang budaya, harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal.

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima yang bersumber dari APBD Kota Bima Tahun 2016 dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran strategis pelestarian nilai-nilai budaya, antara lain :

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, maka dapat disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia (meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia maupun sumberdaya kelembagaan) telah dipergunakan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini.

#### 4. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Pendidikan

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan ini dioperasionalkan melalui sejumlah indikator kinerja, yaitu angka rata-rata lama sekolah, rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) untuk SD dan SMP.

Adapun pencapaian masing-masing indikator tersebut dideskripsikan secara lebih terperinci sebagaimana pembahasan berikut.

##### a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia, khususnya pada aspek pendidikan. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

Data Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan data capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bima untuk tahun 2016. Ini berarti bahwa data capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Bima untuk tahun 2017 hingga saat ini belum tersedia karena data tersebut baru akan *direlease* oleh BPS Kota Bima pada pertengahan tahun 2018.

Menurut data BPS tahun 2017, Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima hingga tahun 2016 adalah 10,13 tahun. Angka ini terus meningkat selama kurun empat tahun terakhir, dimana rata-rata lama sekolah pada tahun 2014 sebesar 9,46 tahun, pada tahun 2015 mencapai 9,58 tahun dan pada tahun 2016 mencapai 9,96.

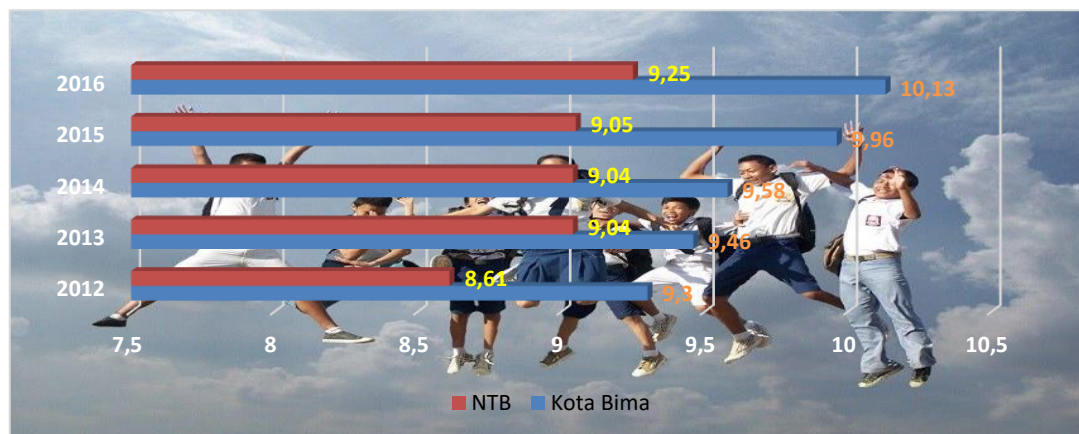
**Tabel 3.11. Capaian Kinerja Rata-rata Lama Sekolah**

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2014	9,20	9,46	102,82
Tahun 2015	9,60	9,58	99,79
Tahun 2016	9,80	9,96	101,63
Tahun 2017	10	10,13	101,3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, 2018

Angka rata-rata lama sekolah Kota Bima yang terus meningkat pada setiap tahun didukung oleh :

- makin membaiknya sarana-sarana pendidikan
- dukungan beasiswa
- biaya operasional sekolah (BOS)
- serta makin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan.



Pemerintah Kota Bima terus berupaya melakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta adanya penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

b. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.

Ujian Nasional (UN) yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasilnya digunakan sebagai: (1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan; (2) seleksi masuk jenjang pendidikan

berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima menyebutkan bahwa rata-rata nilai UN untuk SD yang diselenggarakan pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar 7,25 dari target rata-rata nilai UN sebesar 5,50 atau dengan tingkat capaian 131,81%. Sedangkan nilai rata-rata UN untuk tingkat SMP hanya sebesar 4,7 dari target 5,50 atau dengan tingkat capaian 85,46%. Artinya, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2017 sebesar 5,98 atau dengan capaian 108,87%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2017 mengalami kenaikan. Rata-rata nilai UN yang diselenggarakan pada tahun 2016 telah terealisasi sebesar 5,32 dari target rata-rata nilai UN sebesar 5,50. Artinya, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2016 sebesar 96,73%.

**Tabel 3.12. Capaian Kinerja Rata-Rata Nilai UN Tahun 2017**

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017
SD/MI/Paket A	5,60	6,89	7,25
SMP/MTs/Paket B	<b>5,71</b>	<b>3,75</b>	4,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, 2018

Salah satu faktor pendukung dalam upaya peningkatan rata-rata nilai UN adalah hasil beberapa kajian yang memperlihatkan bahwa UN memberikan kontribusi bagi kegiatan pembelajaran di kelas, yang akhirnya tertuju pada peningkatan hasil belajar. Siswa mempersepsikan positif terhadap kegiatan UN, dan akhirnya akan memberikan motivasi pada diri siswa (*intrinsic motivation*) untuk belajar dengan giat dalam mempersiapkan UN. Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2017 juga sebenarnya dinilai lebih berkualitas karena UN bukan lagi menjadi penentu kelulusan sehingga atmosfer ketegangan pada siswa menjelang ujian pun berkurang meskipun rata-rata nilai UN SMP masih tergolong sangat rendah.

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima yang bersumber dari

APBD Kota Bima Tahun 2017 dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya mutu pendidikan, antara lain :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Non Formal
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Selain itu, terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya manusia, maka dapat disebutkan bahwa sumberdaya manusia yang tersedia telah dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini meskipun indikator kinerja belum tercapai sesuai dengan target.

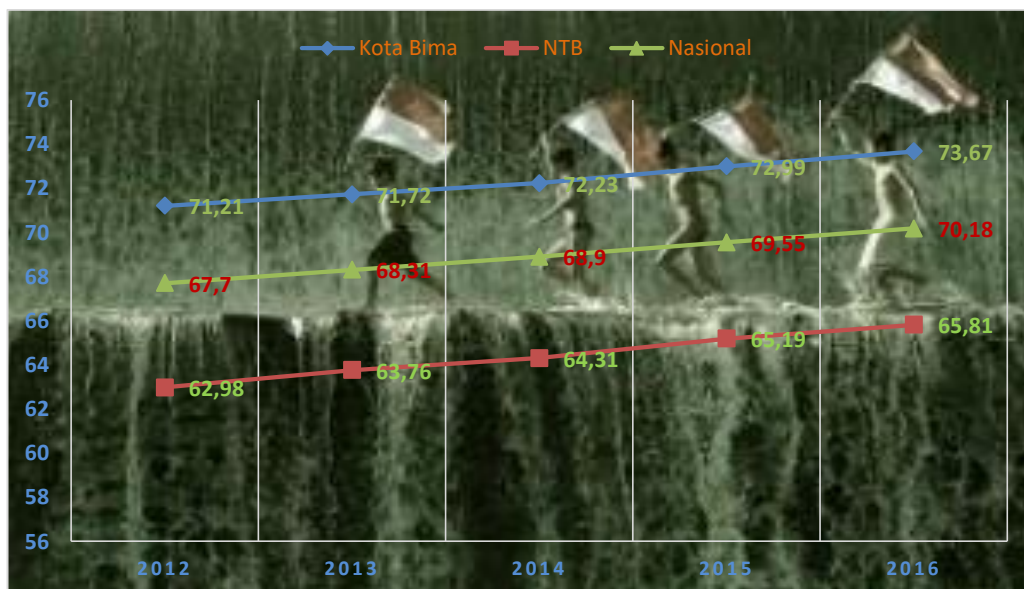
## **5. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing**

Pencapaian sasaran strategis ini diimplementasikan ke dalam sejumlah indikator kinerja utama, yaitu :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu : (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan/tingkat pendidikan dan (3) standar hidup layak. Dimensi umur yang panjang dapat diukur dari indikator Angka Harapan Hidup, dimensi pengetahuan diukur dari indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, dan dimensi hidup layak diukur dari nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Data IPM yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan data capaian IPM Kota Bima untuk tahun 2016. Berdasarkan data, capaian IPM Kota Bima untuk tahun 2016 mencapai 73,67 dari target sebesar 73 atau dengan tingkat capaian sebesar 100,92%. Angka IPM ini apabila dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir IPM Kota Bima mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari 71,21 pada tahun 2012 menjadi 73,67 pada tahun 2016. Kenaikan IPM Kota Bima selama 2012-2016, sejalan dengan kenaikan IPM di Provinsi NTB dari 62,98 pada tahun 2012 menjadi 65,81 pada tahun 2016.

Peningkatan IPM dan komponen-komponennya selama periode 2013-2016, mencerminkan adanya suatu progres yang berarti dalam peningkatan pembangunan kualitas manusia. Walaupun demikian, bukan berarti pembangunan di Kota Bima telah maksimal. Dari tiga komponen penyusun IPM, terutama pada komponen PPP, Kota Bima masih sangat tertinggal, walaupun dari sudut kesehatan maupun pendidikan sudah memperoleh hasil yang cukup membanggakan.

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan propinsi NTB, maka nilai IPM Kota Bima pada tahun 2016 lebih tinggi dari angka IPM nasional dan Propinsi NTB. Tingginya nilai IPM Kota Bima didukung oleh tingginya nilai komponen pembentuk IPM. Untuk mendukung pencapaian IPM tersebut Pemerintah Kota Bima melakukan peningkatan kualitas program pada Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Beberapa program dan kegiatan yang berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Bima adalah meliputi:



1. Program pendidikan anak usia dini
2. Program pendidikan non formal
3. Program Pengembangan lingkungan sehat
4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, maka dapat disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia (meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia maupun sumberdaya kelembagaan) telah dipergunakan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini.

b. Persentase Penduduk miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Bima pada tahun 2016 mengalami penurunan, dimana sesuai dengan data yang dirilis oleh BPS bahwa data persentase penduduk miskin tahun terakhir adalah sebesar 9,51% dari target yang ditetapkan sebesar 9,00% atau tercapai sebesar 94,64%. Sebagaimana telah dipublikasikan oleh BPS Kota Bima bahwa persentase penduduk miskin di Kota Bima pada tahun 2016 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 sebesar 9,85% dan tahun 2014 sebesar 9,74%.

**Tabel 3.13. Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2016**

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2014	10,93	9,74	110,88
Tahun 2015	9,93	9,85	90,55
Tahun 2016	9,00	9,51	94,64

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

**Tabel 3.14. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2012-2016**

Kota Bima	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	15.878	15.249	15.312	15.700	15.420
Tingkat Kemiskinan (%)	10,54	9,91	9,74	9,85	9,51

Beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bima diarahkan untuk pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia sebagai berikut : pemenuhan hak atas pangan, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, pemenuhan hak atas pelayanan pendidikan, pemenuhan hak atas pekerjaan, pemenuhan hak atas rumah, pemenuhan hak atas tanah, pemenuhan hak atas

air bersih, pemenuhan hak untuk berpartisipasi, pemenuhan hak atas layanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan pemenuhan hak rasa aman.

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima APBD Kota Bima Tahun 2017 dalam rangka pencapaian sasaran persentase pengurangan penduduk miskin, antara lain :

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- d. Program Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM
- e. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan

Terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, maka dapat disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia (meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia maupun sumberdaya kelembagaan) telah dipergunakan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini.

c. Pengangguran Terbuka

Data Pengangguran Terbuka yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan data pengangguran terbuka Kota Bima untuk tahun 2016. Ini berarti bahwa data capaian Angka Melek Huruf Kota Bima untuk tahun 2017 hingga saat ini belum tersedia karena data tersebut baru akan di-*release* oleh BPS Kota Bima pada pertengahan tahun 2018.

Karakteristik ketenagakerjaan menurut lapangan usaha di Kota Bima pada tahun 2016 masih didominasi pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Sementara sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi berada di urutan selanjutnya. Angka pengangguran terbuka pada tahun 2016 adalah sebesar 8,89 persen dari target 7,50 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 84,36 persen.

Capaian kinerja indikator pengangguran terbuka ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya mengalami sedikit perbaikan.

Pada tahun 2013 angk pengangguran terbuka sebesar 9,13 persen, kemudian turun menjadi 8,69 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 naik lagi menjadi 10,15 persen. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari dua per tiga penduduk kota Bima termasuk dalam angkatan kerja. Tingginya proporsi penduduk usia kerja yang bekerja yaitu di atas 90% menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Kota Bima sudah cukup baik. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bima mengalami fluktuatif.

Gambaran karakteristik ketenagakerjaan Kota Bima pada kurun empat tahun terakhir dapat dilihat dari hasil olah data Sakernas sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.15. Statistik Ketenagakerjaan Kota Bima Tahun 2013-2016**

Uraian	2013	2014	2015	2016
TPAK (%)	66,39	69,32	68,11	67,83
Tingkat Pengangguran (%)	9,13	8,69	10,15	8,89
Bekerja	90,87	91,31	89,85	91,11

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bima (BPS, 2017)

Dalam rangka mendukung peningkatan pencapaian terkait penurunan tingkat pengangguran di Kota Bima, Pemerintah Kota Bima melakukan peningkatan kualitas program ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini didukung pula oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai. Beberapa program strategis bidang ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan, antara lain :

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

## 6. Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pencapaian sasaran strategis ini diimplementasikan ke dalam sejumlah indikator kinerja utama, yaitu :

a. Usia Harapan Hidup

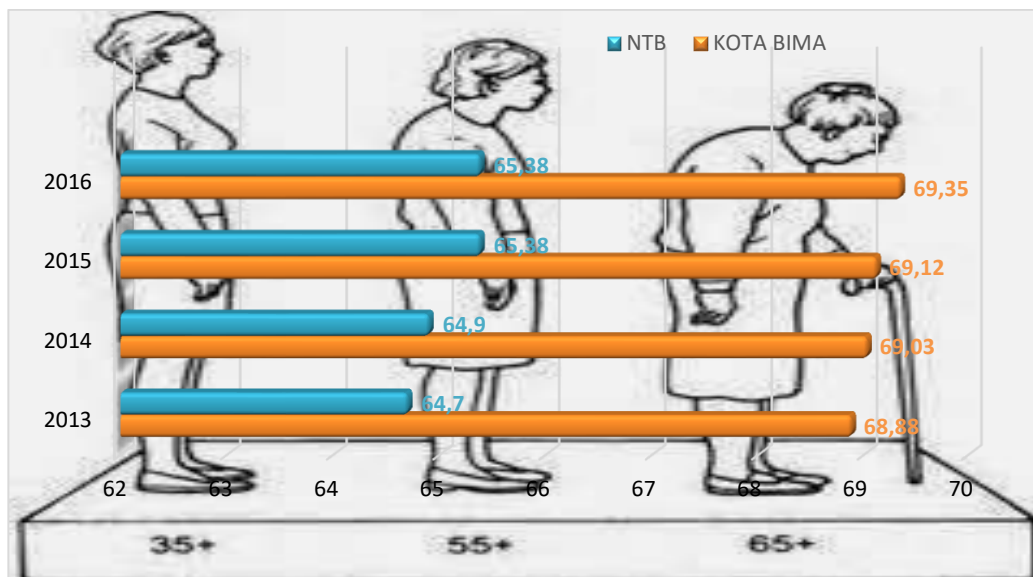
Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Data Angka Harapan Hidup yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan data capaian Angka Harapan Kota Bima untuk tahun 2016. Ini berarti bahwa data capaian Angka Harapan Hidup Kota Bima untuk tahun 2017 hingga saat ini belum tersedia karena data tersebut baru akan di-release oleh BPS Kota Bima pada pertengahan tahun 2018. Menurut data BPS tahun 2017, Angka Harapan Hidup di Kota Bima hingga tahun 2016 adalah 69,35 tahun.

**Tabel 3.16. Capaian Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2014-2016**

No.	Angka Harapan Hidup	Target	Realisasi	% Capaian
1.	AHH Tahun 2013	68,80 tahun	68,88 tahun	100,12
2.	AHH Tahun 2014	69,00 tahun	69,03 tahun	100,04
3.	AHH Tahun 2015	69,20 tahun	69,12 tahun	99,88
4.	<b>AHH Tahun 2016</b>	<b>69,40 tahun</b>	<b>69,35 tahun</b>	<b>99,93</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2017



Adapun program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup adalah antara lain:

1. Program Standarisasi Pelayanan kesehatan
2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
4. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya

Terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, maka dapat disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia (meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia maupun sumberdaya kelembagaan) telah dipergunakan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini.

#### b. Angka balita gizi buruk

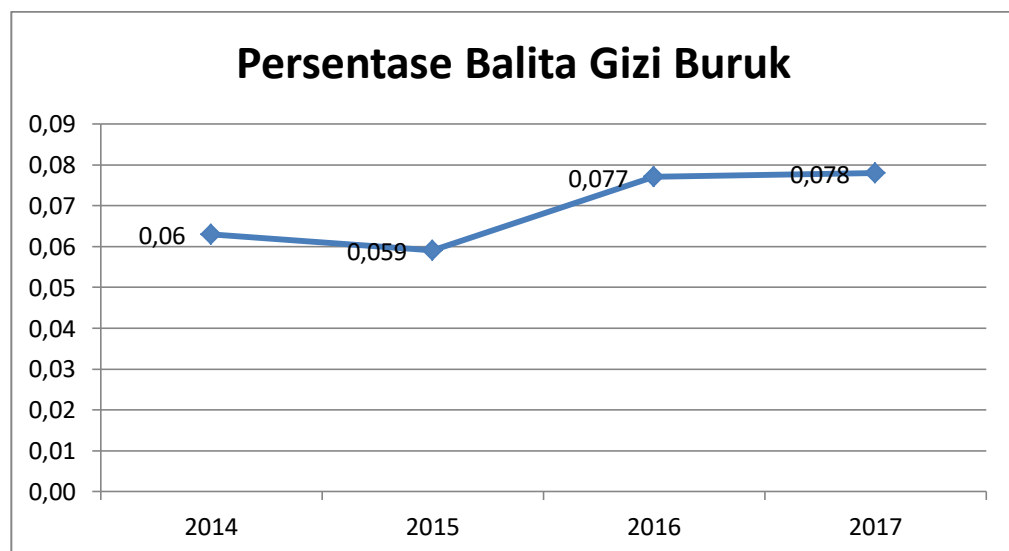
Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score  $< -3$  SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor).

Data Dinas Kesehatan Kota Bima menyebutkan bahwa dari jumlah aksus balita gizi buruk di Kota Bima pada tahun 2017 adalah sebanyak 13 kasus gizi

buruk dari 13.601 balita. Sedangkan pada tahun 2016 dengan jumlah kasus sebanyak 15 kasus dari 14.089 balita.

Persentase balita gizi buruk diperoleh dari membandingkan jumlah balita gizi buruk yang terjadi pada periode tertentu dengan Jumlah balita yang ada pada periode yang sama.

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2017 sebesar 0,078 dari target 0,075. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, Persentase balita gizi buruk di Kota Bima tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,059 % dari target 0,085%, dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,077% dari target 0,080. hal ini menunjukan tingkat keberhasilan program dalam rangka menekan kejadian kasus gizi buruk yang ada di Kota Bima masih kurang. Demikian pula jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2018 sebesar 0,070%, capaian Dinas Kesehatan Kota Bima masih sekitar 0,05% yang harus dipenuhi. Adapun Angka kematian bayi di Kota Bima Tahun 2014 s/d 2017 dapat dilihat pada gambar berikut:



Adapun kegiatan –kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program yaitu adanya kegiatan penjaringan kasus secara berkala, surveilans gizi, konsultasi, pemeriksaan balita oleh dokter ahli, pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kelas gizi di puskesmas. Program lain yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan Pemberian

Makanan Tambahan (PMT) pemulihan gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi kurang, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-ASI, pemberian biaya perawatan gizi buruk, diskusi refleksi kasus gizi buruk rakorcam tentang hasil penimbangan balita.

Penyebab masih terjadinya kasus gizi buruk di Kota Bima ada 2 hal yaitu asupan gizi dan penyakit infeksi. Asupan gizi dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, daya beli, tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi ibu. Sedangkan Infeksi dipengaruhi oleh hygiene dan sanitasi serta pelayanan kesehatan. Adapun Dilihat dari aspek penanganannya, cakupan penanganan kasus balita gizi buruk tahun 2017 adalah sebesar 100%, sama dengan capaian pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, maka target tersebut mampu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima.

**Tabel 3.17. Capaian Kinerja Angka Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2015-2017**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2015	0,085 %	0,059 %	144,07%
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2016	0,080 %	0,077 %	103,89%
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2017	0,075 %	0,078 %	96,15%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2018

Adapun program pembangunan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja Angka Balita Gizi Buruk adalah meliputi:

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2. Program Upaya kesehatan masyarakat

c. Angka kematian ibu melahirkan

Angka kematian ibu (*Martenal Mortality Rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu serta kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

**Tabel 3.18. Capaian Kinerja Angka Kematian Ibu Melahirkan**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Angka kematian ibu melahirkan	2015	148/100.000	87/100.000	170,11
	2016	148/100.000	148/100.000	100,00
	2017	148/100.000	188/100.000	78,72

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2018

Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai.

Hasil kajian audit didapatkan penyebab kematian ibu sebesar 50% karena tidak terdeteksinya komplikasi pada ibu hamil yang disebabkan oleh status sosial ibu seperti hamil diluar nikah, istri siri dan single parent. penyebab langsung yaitu perdarahan dan eclampsia, hal ini dapat menjadi petunjuk bagi perencanaan program di tahun yang akan datang agar lebih difokuskan kepada kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta risiko. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin dan pemanfaatan jampersal tanpa memandang status sosial. Serta dibutuhkan peningkatan kualitas SDM dalam hal teamwork yang solid serta response time yang cepat dalam hal pengenalan risiko, penegakan diagnosa dan ketepatan dalam pengambilan keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan tindakan dan kesalahan intervensi sehingga kematian ibu dapat dicegah dan diturunkan.

Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program kesehatan reproduksi dan KB dengan kegiatan antara lain: Pertemuan Koordinasi, Validasi dan Sinkronisasi Data ANC Terpadu - Pertemuan Refresing APN - Pertemuan Kemitraan Bidan dengan Kader dan Dukun - DRK



(Diskusi Refleksi Kasus) Tk. Kota Bima - Pengadaan Buku-buku Register KIA - Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi ke Puskesmas - Pertemuan Peningkatan Pelayanan KB pasca Salin dan MKJP dengan Lintas Sektor - Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Puskesmas PKPR.

Adapun program yang dilaksanakan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan di Kota Bima antara lain meliputi:

1. Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB
2. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya

## **7. Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar**

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar diukur melalui kinerja sejumlah indikator utama, yaitu :

### **a. Persentase rumah tangga berakses air bersih**

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.

Air bersih dengan standar air minum adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air Bersih di kawasan perkotaan dan juga perdesaan.

Capaian kinerja program pengembangan pengelolaan Air Bersih yang didukung oleh APBD dan APBN pada tahun 2017 telah memfasilitasi jumlah rumah tangga berakses air bersih layak dengan tingkat pencapaian sebesar 35.790 rumah tangga dari target 36.478 rumah tangga atau sebesar 98,15% pada tahun 2017.

Pada tahun 2016 dapat memfasilitasi rumah tangga berakses air bersih layak sebanyak 33.467 atau sebesar 100,22% dari target 33.392 rumah tangga maka terjadi penurunan sebesar 6.97% dari capaian tahun lalu.

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Akhir RPJMD 2018 sebesar 38.414 rumah tangga atau 100%, maka capaian kinerja rumah tangga berakses air minum layak 93,25%.

Ini dapat disimpulkan capaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh pengalokasian anggaran untuk belanja langsung lebih besar dari tahun sebelumnya dan Keikutsertaan masyarakat di dalam mengontrol pembangunan daerah semakin tinggi. Keberhasilan tersebut menunjukkan Semangat kerja dan disiplin kerja aparatur semakin meningkat.

Capaian target indikator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

**Tabel 3.19. Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Rumah Tangga)	Realisasi (Rumah Tangga)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	87,19	36.478	35.790	98,15	93,25

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja rumah tangga berakses air bersih, antara lain :

- Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program prakarsa permukiman 100 0 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Selain faktor-faktor pendorong keberhasilan, terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang sadar tentang perilaku pola hidup bersih dan sehat.
- Masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program untuk sasaran strategis ini antara lain ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Adapun strategi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi terkait peningkatan persentase rumah tangga berakses air bersih ini, antara lain :

- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan air.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan program-program yang terkait dengan penyediaan air bersih dan sanitasi untuk kawasan permukiman.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berpola hidup bersih dan sehat lebih baik lagi.

Adapun program pembangunan yang dilaksanakan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

b. Persentase Rumah Layak Huni yang dibangun

Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun di Kota Bima pada tahun 2017 sesuai data yang ada di Kota Bima mencapai 502 unit, dari yang ditargetkan sebesar 466 unit. Ini berarti persentase realisasi ini sebesar 92,77%.

Rumah layak huni yang dibangun ini meningkat bila dibandingkan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 ditargetkan Rumah layak huni yang dibangun sebanyak 500 unit dengan realisasi hanya 302 unit atau hanya 60,40%. Pembangunan rumah layak huni ini antara lain dilaksanakan melalui bantuan sosial bedah rumah.

**Tabel 3.20. Capaian Kinerja Indikator Rumah Layak Huni Tahun 2017**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Rumah Layak	100 %	92,77 %	92,77%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Huni yang dibangun			

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2018

**Tabel 3.21. Rumah Layak Huni yang Dibangun Tahun 2017**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
Rumah Layak Huni	502 unit	466 unit	92,77 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2018

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja rumah layak huni, antara lain :

- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program prakarsa permukiman 100 0 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
- Adanya kebijakan dari baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengurangi rumah tidak layak huni antara lain melalui program bantuan stimulant perumahan swadaya dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja rumah layak huni, yaitu :

- Program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan sasaran strategis ini melibatkan banyak OPD yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan antar OPD.
- Masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program untuk sasaran strategis ini antara lain ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Adapun strategi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi terkait peningkatan persentase rumah layak huni, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antar OPD sehingga terjadi sinergitas dan menghindari konflik dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan program-program yang terkait dengan sanitasi, persampahan, air bersih, perumahan dan permukiman.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berpola hidup bersih dan sehat lebih baik lagi.

Adapun program pembangunan untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di Kota Bima pada tahun 2017 meliputi:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Pemberdayaan komunitas perumahan

c. Rumah Tangga Bersanitasi Baik

Program pengembangan pengelolaan Sanitasi yang didukung oleh APBD baik bersumber dari dana DAK maupun DAU pada tahun 2017 jumlah rumah tangga (RT) di Kota Bima sebanyak 38.382 RT. Dari program pengembangan pengelolaan sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memfasilitasi penanganan jumlah rumah tangga bersanitasi mencapai 33.479 RT dari capaian yang ditargetkan sebanyak 34.558 rumah tangga, sehingga tingkat pencapaian pada indikator rumah tangga bersanitasi di tahun 2017 sebesar 96,92%.

Pada tahun 2016 telah memfasilitasi rumah tangga bersanitasi sebanyak 30.794 rumah tangga atau sebesar 100,29% dari target 30.705, maka capai jumlah rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 menunjukkan penurunan 3,37% dari capaian tahun lalu ini disebabkan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk memperbanyak SR (sambungan rumah).

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra dan akhir RPJMD 2018 sebesar 38,414 rumah tangga atau sebesar 100%, maka capain program/kegiatan telah mencapai 87,32% rumah tangga bersanitasi. Ini dapat disimpulkan capaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh pengalokasian anggaran untuk belanja langsung untuk Program Sanitasi lebih besar dari tahun sebelumnya dan Keikutsertaan masyarakat di dalam mengontrol pembangunan daerah semakin

tinggi. Keberhasilan tersebut menunjukkan semangat kerja dan disiplin kerja aparatur semakin meningkat. Capaian target indikator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

**Tabel 3.22. Kinerja Indikator Rumah Tangga Bersanitasi**

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (RT)	Realisasi (RT)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Persentase rumah tangga Bersanitasi	80,23	34.558	33.479	96,92	87,32

d. Persentase Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi

Konektivitas wilayah merupakan salah satu indikator utama yang menunjukkan adanya pemerataan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap wilayah dalam Kota Bima telah memiliki aksesibilitas yang baik dan tidak ada lagi wilayah yang terisolir. Konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi dikonstruksikan oleh adanya pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan.

Pencapaian indikator Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi yang diwujudkan melalui program pembangunan jalan dan jembatan. Telah terealisasi sebesar 101,45% atau sepanjang 265,13 Km dari yang ditargetkan sepanjang 261,22 Km.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 yang terealisasi 255,52 Km dari target 254,23 Km atau 100,51%, maka capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,94% dari tahun lalu,

Dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 sepanjang 268,86 km atau 100% maka pencapaian kinerja pada indikator Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi melalui program pembangunan jalan dan jembatan sudah mencapai 265,13 Km atau sebesar 98,61%. Sehingga terjadi peningkatan penambahan panjang jalan sebesar 9,60 Km atau 2,84%

Capaian target indikator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Tabel 3.23.Kinerja Indikator Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (km)	Realisasi (km)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
3.	Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi	95,04	261,33	265,13	101,45	98,61

Terdapat beberapa faktor yang menghambat percepatan konektivitas wilayah, yaitu antara lain kondisi topografi wilayah terutama di sebagian wilayah Kota Bima yang memiliki kemiringan dan kelerengan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan kendala dalam pembukaan jalan baru karena memerlukan anggaran dan teknologi yang besar.

Adapun beberapa faktor kunci keberhasilan capaian kinerja konektivitas wilayah adalah antara lain adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan wilayah dan pemerataan pembangunan secara lebih luas.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk lebih memantapkan lagi upaya pencapaian indikator konektivitas wilayah pada tahun-tahun berikutnya, maka pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan, program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan perlu untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

## 8. Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

### a. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan penilaian atas kinerja instansi pemerintah kota Bima Tahun 2016 dengan target nilai 65,00 dan terealisasi sebesar 62,58 (kategori B/Baik) atau capaian kinerja sebesar 96,28%.

Kategori B menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang dinilai baik dalam penggunaan anggaran jika dihubungkan dengan capaian kinerjanya,

kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang beroreantasi pada hasil di pemerintah Kota Bima.

Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bima Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,37 poin jika dibandingkan dengan capai kinerja tahun 2016.

Faktor yang mendukung peningkatan nilai kinerja instansi pemerintah Kota Bima , adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Bima telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi tahun 2016.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima memuat visi, misi, dan tujuan yang disertai dengan ukuran target keberhasilan, memuat sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran serta target tahunan. RPJMD Kota Bima pun telah dipublikasikan melalui website Kota Bima
- 3) Kota Bima telah menetapkan secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bima dan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). IKU tersebut telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 4) Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan hasil pengukuran kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan.
- 5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Bima Tahun 2016 telah disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementrian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, demikian juga laporan Kinerja OPD telah disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; Laporan Kinerja OPD pun telah direviu oleh APIP;
- 6) Pemerintah Kota Bima, telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencapaian kinerja serta evaluasi terhadap laporan kinerja OPD. Evaluasi tersebut menggunakan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja mengaju kepada pedoman evaluasi kinerja yang diterbitkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja OPD telah ditindaklanjuti untuk memperbaiki perencanaan program dimasa yang akan datang. sedangkan hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.



- 7) Capaian Kinerja Kota Bima dan OPD nya telah menampakkan ke arah perbaikan.

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemkot Bima untuk meningkatkan Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) OPD di lingkungan Kota Bima akan menetapkan hal-hal yang hendak dicapai dalam jangka menengah, yang dapat menjadi acuan dalam menyusun perencanaan kinerja maupun perjanjian kinerja dimasa mendatang.
- 2) Kota Bima dan OPD agar menyusun rencana aksi atas kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan target-target kinerja dalam dokumen perjanjian Kinerja.
- 3) Melakukan perbaikan terhadap IKU OPD sehingga dapat menggambarkan keberhasilan OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya (sesuai dengan prinsip SMART)
- 4) Melakukan perbaikan terhadap ukuran kinerja Individu untuk tingkat eselon III dan IV yang merupakan turunan dari kinerja atasannya sehingga pencapaiannya dapat secara langsung mendukung kinerja atasannya.
- 5) Mengembangkan metode pengumpulan data kinerja yang mudah diterapkan sehingga capaian kinerja dapat diinformasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan kinerja paling tidak mempunyai pedoman pengumpulan data kinerja dan pihak-pihak yang diberi tanggungjawab untuk pengelolaan data kinerja. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Bima;
- 6) Laporan kinerja OPD di lingkungan Kota Bima akan menginformasikan kinerjanya dengan baik, terutama yang berkaitan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;

- 7) Meningkatkan kualitas evaluasi internal, dengan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi internal. Pedoman evaluasi internal akan di sesuaikan dengan karakteristik implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bima, namun tetap mengacu kepada Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 8) Kompetensi maupun kualitas evaluator akan ditingkatkan dengan pelatihan yang teratur. Dan evaluasi internal seharusnya dimulai dari perencanaan yang didukung oleh semua aparatur, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung;
- 9) Meningkatkan komitmen terhadap pencapaian kinerja atas dokumen-dokumen kinerja yang telah ditetapkan.

Program yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja penilaian kinerja instansi pemerintah daerah adalah:

1. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  3. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
  4. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan ekonomi dan Infrastruktur
  5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- b. Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima yang dikeluarkan pada tahun 2017 merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima tahun 2016 dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terealisasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja 100%.

Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mempertahankan capaian kinerja di tahun

2016 yang juga berpredikat WTP. Status opini dari BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD Kota Bima menandakan semakin baiknya pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bima dari tahun ketahun.

Sebagai tolak ukur capaian kinerja tahun 2017 atas Opini BPK RI terhadap LKPD diambil dari hasil opini BPK RI tahun anggaran 2016. Adapun gambaran Opini yang dicapai selama 5 tahun dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kota Bima belum mampu menerapkan Prinsip akuntansi dalam laporan keuangan secara konsisten sehingga belum bisa keluar dari opini disclaimer. Pada tahun 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Bima mulai melakukan perubahan berupa perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan opini dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Upaya perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh pemerintah daerah terutama atas pengelolaan aset daerah, sampai akhirnya pada tahun 2014, 2015 dan 2016 pemerintah Kota Bima meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Faktor yang mendukung capaian hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Bima adalah sebagai berikut :

- 1) Komitmen yang sangat tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan LKPD bekerja sama dengan BPKP perwakilan NTB
- 3) Pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi SIMDA dan SIMBADA

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan capaian kinerja opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Bima pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Memperbaiki pengelolaan Aset Daerah

- 3) Memperbaiki sistem penganggaran dan realisasi belanja , agar tidak terjadi salah penganggaran dan salah realisasi belanja
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Program yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja opini pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, yaitu :

- 1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capai kinerja dan keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

c. Persentase OPD dengan SAKIP baik

Persentase Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi OPD di Kota Bima merupakan penilaian atas kinerja OPD Tahun 2017 dengan target sebanyak 20 OPD bernilai baik (kategori B) dan mampu terealisasi sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja sebesar 100,00 %. Bahkan ada 1(satu) OPD yang memperoleh nilai A yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi, serta 3 (dua) OPD yang berkategori BB yaitu Bappeda, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

## 9. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Pemerintah daerah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang.

Tingkat keberhasilan peningkatan pelayanan publik di Kota Bima tergambar dari pencapaian beberapa indikator kinerja utama sebagai berikut :

a. Rata-rata lama proses pelayanan perijinan

Bahwa rata-rata lama setiap proses pelayanan perijinan di Kota Bima ditargetkan selama 1,25 hari dengan tingkat realisasi sebesar 1,25 hari. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat capaian kinerja untuk indikator

tersebut sebesar 100%. Adapun jenis pelayanan perijinan yang ada di Kota Bima Tahun 2017 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel

**Tabel 3.24. Capaian Kinerja Lama Proses Perijinan di Kota Bima**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	<b>1. Rata-rata lama Proses Pelayanan Perizinan :</b>	<b>1,25 hari</b>	<b>1,25 hari</b>	<b>100 %</b>
		1. Izin Gangguan (HO)	3 hari	3 hari	100 %
		2. Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	1 hari	1 hari	100 %
		3. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT)	1 hari	1 hari	100 %
		4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	1 hari	1 hari	100 %
		5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1 hari	1 hari	100 %
		6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1 hari	1 hari	100 %
		7. Tanda Daftar Industri (TDI)	1 hari	1 hari	100 %
		8. Tanda Daftar Gudang (TDG)	1 hari	1 hari	100 %
		<b>2. Jumlah izin yang diterbitkan :</b>	<b>1906 Lembar</b>	<b>2059 Lembar</b>	<b>108%</b>
		1. Izin Gangguan (HO)	605 Lembar	437 Lembar	72 %
		2. Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	42 Lembar	10 Lembar	24 %
		3. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT)	91 Lembar	77 Lembar	85 %
		4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	121 Lembar	105 Lembar	87 %
		5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	605 Lembar	793 Lembar	131 %
		6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	303 Lembar	560 Lembar	185 %
		7. Tanda Daftar Industri (TDI)	91 Lembar	31 Lembar	34 %
		8. Tanda Daftar Gudang (TDG)	48 Lembar	20 Lembar	42 %

Meningkatnya capaian kinerja indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang intens oleh Pemerintah Kota Bima. Pelaksanaan sosialisasi tersebut mampu membangun pemahaman dan kesadaran

masyarakat dalam perijinan. Selain itu terdapat dukungan program peningkatan kualitas pelayanan perizinan (inventarisasi dan pelaporan perijinan, Penyediaan sarana, dan prasarana pelayanan, penyediaan informasi/data base perijinan, dan monev kegiatan pendataan) terus dilakukan oleh KPPT Kota Bima dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dengan penetapan target dengan hasil BAIK (62,51-81,25) dan Realisasi capaian sebesar 100%. Adapun beberapa jenis Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi Indikator penilaian yang mendukung sebagai berikut :

- Unsur **Persyaratan** , dengan dilakukannya penyederhanaan persyaratan baik yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis dan sarana penunjang lainnya sebagai syarat dalam melaksanakan pelayanan sehingga mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat dengan Nilai 71,83
- Unsur **Prosedur** mengacu kepada SOP Pelayanan perizinan sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik dan adil dengan Nilai 74,83
- Unsur **waktu penyelesaian** dapat dilakukan pengaturan waktu pelayanan sehingga pelayanan dapat lebih efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, dengan Nilai 74,67
- Terhadap unsur Biaya/Tarif, dapat dilakukan penyesuaian regulasi agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan hal ini, nilai 88,00
- Unsur **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, dapat ditingkatkan dengan senantiasa menggunakan format buku mengikuti perkembangan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga produk setiap jenis pelayanan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan Nilai 89,00
- Unsur **Kompetensi Pelaksana**, dapat ditingkatkan dengan menempatkan petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan Nilai 81,00
- Unsur **Perilaku Pelaksana**, dapat ditingkatkan dengan senantiasa memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pelayanan yang berdedikasi tinggi, berpenampilan baik, ramah, sopan dan

memahami prinsip-prinsip pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dengan Nilai 81,83

- Unsur Maklumat pelayanan, dapat dilaksanakan dengan baik apabila sarana dan prasaran penunjang kegiatan pelayanan termasuk penganggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit pelaksanaan pelayanan, dengan Nilai 85,83
- Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, bahwa terhadap penanganan pengaduan, saran dan masukan telah ditindak lanjuti dengan baik namun masih perlu ditingkatkan lagi dengan menempatkan petugas yang memiliki kemampuan untuk menangani hal itu, dengan nilai 84,83

Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan tersebut berjalan efektif adalah : tersedianya anggaran yang cukup; adanya Kemitraan dan koordinasi dengan Dinas/badan teknis terkait; tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup memadai; tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

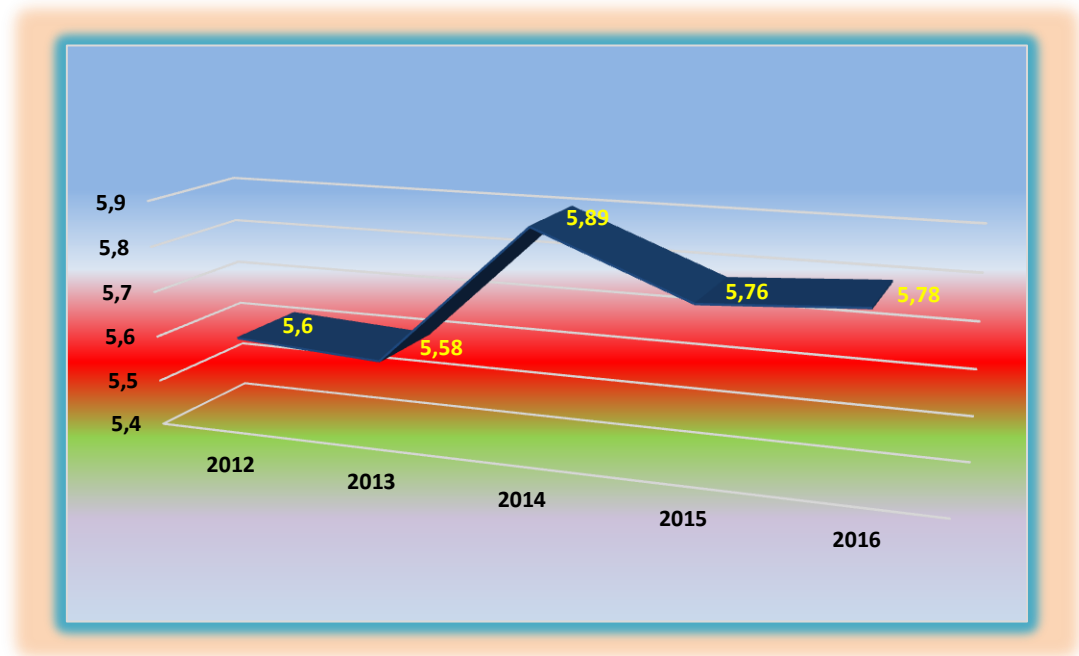
## 10. Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran tingkat keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan oleh hasil pengukuran indikator kinerja pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan memperhatikan Produk Domestik Regional bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Pengukuran capaian kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 di Kota Bima dapat ditunjukkan dari hasil data PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima Tahun 2017 yang isinya memuat kinerja pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2016.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada tahun 2016 adalah sebesar **5,78 persen**. Dengan demikian capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Bima adalah sebesar 96,33 persen dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan yaitu sebesar 6,00 persen.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, maka Angka pertumbuhan tersebut mengalami fluktuasi. Secara rinci laju pertumbuhan ekonomi Kota Bima Tahun 2012 – 2016 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.



Ditinjau berdasarkan pertumbuhan masing-masing sektor, maka pertumbuhan ekonomi Kota Bima persektor dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini

**Tabel 3.25. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima pada masing-masing sektor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2012-2016**

Kategori	2012	2013	2014	2015	2016*
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,01	1,94	3,57	4,14	1,92
B Pertambangan dan Penggalan	6,44	(5,10)	6,56	7,39	6,21
C Industri Pengolahan	4,78	5,18	3,84	3,82	5,84
D Pengadaan Listrik dan Gas	12,43	24,96	39,81	(5,25)	17,35
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,20	1,84	3,35	2,44	4,58



Kategori	2012	2013	2014	2015	2016*
F Konstruksi	6,03	6,76	6,50	6,62	8,35
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,55	9,28	7,32	7,25	8,01
H Transportasi dan Pergudangan	4,52	5,02	5,56	5,88	5,45
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,63	6,86	6,36	6,78	8,12
J Informasi dan Komunikasi	7,65	4,06	6,84	7,14	8,54
K Jasa Keuangan dan Asuransi	8,70	7,71	6,12	6,52	6,37
L Real Estate	5,32	6,00	5,80	6,43	5,85
M,N Jasa Perusahaan	7,37	4,89	6,88	5,15	5,35
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,48	3,36	4,92	3,83	2,64
P Jasa Pendidikan	3,23	4,55	6,45	6,28	5,87
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,87	4,38	5,06	5,30	5,89
R,S,T U Jasa lainnya	7,50	7,54	7,85	6,03	6,60
<b>PDRB</b>	<b>5,60</b>	<b>5,58</b>	<b>5,89</b>	<b>5,76</b>	<b>5,78</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

\*) Angka Sementara ;

**Tabel 3.26. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima  
Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**

Kategori	2012		2013*		2014**		2015****		2016****	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	329.910,43	16,00	336.300,89	15,44	348.300,89	15,11	362.720,26	14,87	369.683,03	14,33
B Pertambangan dan Penggalian	9.435,46	0,46	8.954,16	0,41	9.541,55	0,41	10.247,07	0,42	10.883,88	0,42
C Industri Pengolahan	76.078,28	3,69	80.022,40	3,67	83.091,96	3,60	86.266,01	3,54	91.305,57	3,54
D Pengadaan Listrik dan Gas	3.219,54	0,16	4.023,22	0,18	5.624,75	0,24	5.329,26	0,22	6.253,89	0,24
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	797,75	0,04	812,44	0,04	839,68	0,04	860,19	0,04	899,57	0,03
F Konstruksi	193.122,28	9,36	206.177,73	9,47	219.580,18	9,52	234.125,70	9,60	253.666,65	9,83

Kategori	2012		2013*		2014**		2015****		2016****	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	442.759,90	21,47	483.862,68	22,22	519.25259,27	22,52	556.890,99	22,84	601.525,03	23,32
H Transportasi dan Pergudangan	222.056,88	10,77	233.209,92	10,71	246.169,98	10,68	260.664,79	10,69	274.842,66	10,65
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.255,68	2,44	53.703,74	2,47	57.118,64	2,48	60.993,37	2,50	65.947,50	2,56
J Informasi dan Komunikasi	36.788,75	1,78	38.284,13	1,76	40.903,95	1,77	43.826,09	1,80	47.570,24	1,84
K Jasa Keuangan dan Asuransi	46.608,37	2,26	50.203,07	2,31	53.276,78	2,31	56.748,34	2,33	60.363,84	2,34
L Real Estate	102.889,31	4,99	109.062,67	5,01	115.390,71	5,01	122.808,55	5,04	129.988,46	5,04
M,N Jasa Peahaan	7.231,60	0,35	7.585,39	0,35	8.106,89	0,35	8.524,27	0,35	8.979,99	0,35
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	233.356,63	11,31	241.203,93	11,08	253.082,08	10,98	262.778,38	10,78	269.722,21	10,46
P Jasa Pendidikan	159.813,13	7,75	167.086,93	7,67	177.858,43	7,71	189.031,70	7,75	200.136,14	7,76
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.551,71	3,52	75.729,13	3,48	79.558,07	3,45	83.773,40	3,44	88.707,45	3,44
R,S,T,U Jasa lainnya	75.621,65	3,67	81.321,41	3,73	87.701,70	3,80	92.992,43	3,81	99.127,45	3,84
<b>PDRB</b>	<b>2.062497,35</b>	<b>100</b>	<b>2.177.543,21</b>	<b>100</b>	<b>2.305.405,52</b>	<b>100</b>	<b>2.438.560,80</b>	<b>100</b>	<b>2.579.603,45</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

\*) Angka Sememntara ;

Lebih lanjut, capaian kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima 2013 – 2018 yaitu sebesar 6,5 persen pada tahun 2018, dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian sampai saat sekarang adalah baru mencapai 88,31 persen. Dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari PDRB tersebut serta pengelolaan pembangunan ekonomi di Kota Bima yang cukup baik dan dengan pertumbuhan yang positif, maka target jangka menengah sebesar 6,50 persen tersebut sangat mungkin dicapai pada tahun 2018 sebagai akhir periode RPJMD 2013-2018.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kota Bima yaitu antara lain :

- a. Kondisi ekonomi dan stabilitas regional dan nasional sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seperti tingkat inflasi, kenaikan harga BBM, serta stabilitas politik .
- b. Pertumbuhan sektor pertanian, kelautan dan perikanan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti kemarau panjang dan gagal panen .

Adapun sejumlah faktor keberhasilan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi adalah antara lain :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang berdampak pada membaiknya iklim investasi daerah.
- b. Tersedianya sumber daya alam yang baik sebagai modal dasar pembangunan daerah dimana ketersediaan lahan pertanian yang subur dan kekayaan laut memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan PDRB Kota Bima setiap tahunnya.
- c. Membaiknya kualitas infrastruktur perkotaan serta sarana dan prasarana pendukung sektor perdagangan dan jasa serta transportasi.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dan pembiayaan yang dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja, maka sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam rangka untuk lebih memantapkan lagi upaya pencapaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya, maka pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program pengembangan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program penciptaan iklim UKM yang kondusif, Program pengembangan sistem pendukung UMKM, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, program pengembangan industri kecil dan menengah, program pengembangan sentra-sentra industri potensial, program peningkatan pelayanan perijinan, program peningkatan disiplin aparatur, program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja perlu untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

## 11. Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bima dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi lokal, salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah PDRB Per Kapita.

Pendapatan per kapita pada suatu daerah dapat diindikasikan oleh nilai PDRB per kapita pada tahun tertentu. PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu tahun. PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang melebihi angka inflasi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat lebih baik, dan sebaliknya pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dari inflasi mencerminkan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Untuk mengetahui adanya pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat, dihitung dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB dapat terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB-nya. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 2012-2016 tumbuh pada kisaran angka 6-10 persen, sementara pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 dalam periode yang sama tumbuh sebesar 3-6 persen.

Pendapatan perkapita penduduk berdasarkan harga konstan ditargetkan sebesar 14,80 juta rupiah dengan realisasi sebesar 15,82 juta rupiah atau dengan tingkat capaian 106,89 persen. Pertumbuhan pendapatan perkapita dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.27. PDRB Per Kapita Kota Bima Tahun 2012– 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	2.062.497,35	2.177.543,21	2.305.405,52	2.438.560,78	2.579.603,57

(Juta Rp)					
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	2.192.206,83	2.373.685,91	2.671.111,92	2.993.901,62	3.302.931,48
Jumlah Penduduk (jiwa)	149.800	153.101	156.400	159.736	163.101
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp/jiwa/Tahun)	13,77	14,22	14,74	15,27	15,82
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp/jiwa/Tahun)	14,63	15,50	17,08	18,74	20,25

Pada tahun 2017 PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan menjadi 20,25 juta rupiah dari tahun 2016 sebesar 18,74 juta rupiah. Jika dilihat atas dasar harga konstan maka PDRB perkapita pada tahun 2017 adalah sebesar 15,82 juta atau mengalami kenaikan 0,55 juta dibandingkan dengan PDRB Perakpita tahun 2016 yang hanya sebesar 15,27 juta.

Pendapatan perkapita yang dicapai sampai saat ini sebesar 20,25 juta rupiah jika dibandingkan dengan target RPJMD sampai dengan 2018 yang sebesar 20 juta rupiah telah melebihi target atau dengan capaian 101,25 persen

Berkaitan dengan penilaian penggunaan sumber daya yang dimiliki, apabila dilakukan perbandingan antara besaran sumber daya yang dikeluarkan dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya dan pembiayaan dengan capaian kinerja lebih dari 95 persen. Lebih lanjut, dalam rangka lebih meningkatkan lagi pendapatan perkapita pada tahun-tahun yang akan datang, maka pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah, program pengembangan kewirusahaan dan keunggulan, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program peningkatan pelayanan perijinan, program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, program pengembangan IKM perlu terus dioptimalkan.

## 12. Sasaran Strategis Meningkatnya produksi pertanian

Adapun gambaran tingkat keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian dapat ditunjukkan oleh hasil pengukuran indikator kinerja jumlah produksi pertanian, dalam hal ini produksi pertanian tanaman pangan.

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein. Indikator kinerja produksi pertanian tanaman pangan dalam konteks ini akan mencakup akumulasi dari produksi dari beberapa jenis komoditi yang meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Adapun capaian kinerja produksi tanaman pangan Kota Bima tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.28. Kinerja Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan :				
	- Padi (GKP)	Ton	54.025	41.169	76,20
	- Jagung (PK)	Ton	5.113	12.106	236,77
	- Kedelai (BK)	Ton	2.716	1.309	48,20
	- Kacang Tanah (BK)	Ton	440	368	83,64
	- Kacang Hijau (BK)	Ton	12	62	516,67
	- Ubi Kayu (UB)	Ton	2.849	2.313	81,19
	- Ubi Jalar (UB)	Ton	111	44	39,64

Pencapaian sasaran strategis “*Meningkatnya Produksi Pertanian*” dengan indikator kinerja Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan melebihi dari target yang ditentukan yaitu rata-rata sebesar 154,61%, dimana untuk komoditi jagung dan kacang hijau produksinya diatas 100% sedangkan untuk komoditi lainnya seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar produksinya dibawah target, hal ini disebabkan oleh besarnya animo masyarakat untuk menanam komoditi jagung yang dikarenakan oleh harganya yang menjanjikan dan adanya program nasional dalam mendukung peningkatan produksi jagung, untuk produksi padi yang sebesar 41.169 ton dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan beras masyarakat masih terjadi surplus sebesar 6.955 ton dengan asumsi rata-rata

konsumsi perkapita/pertahun sebesar 114,6 kg/kapita/tahun (*Biro Humas dan Informasi Publik Kementan RI Tanggal 28 September 2017*) dan jumlah penduduk Kota Bima sebesar 149.567 jiwa.

Pada 2017, Pemerintah Propinsi NTB mencanangkan target produksi padi menembus 2,4 juta ton. Dari target itu, produksi sampai bulan September hanya mencapai 2,3 juta ton, dengan luas lahan tanam dicanangkan seluas 475.000 hektare. Dari target tersebut, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pertanian Kota Bima menyumbang produksi padi sebesar 41.169 ton atau sebesar 1,72%.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, maka capaian kinerja produksi pertanian tanaman pangan mengalami fluktuasi dimana untuk beberapa komoditi seperti padi, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan produksi jika dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 2015. Sedangkan komoditi jagung dan kacang tanah mengalami peningkatan produksi. Adapun perbandingan jumlah produksi tanaman pangan pada tahun 2016 dengan beberapa tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.29. Capaian Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2012-2016**

No	Komoditi Tanaman Pangan	Produksi (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi (GKP)	36.900	41.879	42.425	35.808	41.169
2	Jagung (PK)	2.466	3.710	8.028	9.955	12.106
3	Kedelai (BK)	1.855	2.129	2.228	1.697	1.309
4	Kacang Tanah (BK)	212	319	281	383	368
5	Kacang Hijau (BK)	6	11	11	110	62
6	Ubi Kayu (UB)	1.374	3.372	2.679	2.600	2.313
7	Ubi Jalar (UB)	76	95	79	0	44

*Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima, 2017*

Lebih lanjut, capaian kinerja produksi pertanian tanaman pangan tahun 2017 ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima 2013 – 2018 dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

**Tabel 1 Perbandingan capaian kinerja produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2016 dengan Target RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018**

No	Komoditi Tanaman Pangan	Tahun 2016 (ton)		Tahun 2017 (ton)		Target 2018 (ton)	Capaian 2016/Target RPJMD 2018 (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Padi (GKP)	49.114	35.808	54.025	41.169	59.428	60,25
2	Jagung (PK)	4.261	9.955	5.113	12.106	6.136	162,23
3	Kedelai (BK)	2.469	1.697	2.716	1.309	2.987	56,81
4	Kacang tanah (BK)	366	383	440	368	528	72,54
5	Kacang hijau (BK)	10	110	12	62	15	733,33
6	Ubi kayu (UB)	2.374	2.600	2.849	2.313	3.419	76,04
7	Ubi jalar (UB)	101	0	111	44	122	0,00

Sumber : Dinas Pertanian, data diolah

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja untuk indicator produksi pertanian tanaman pangan sampai dengan tahun kedua RPJMD telah mencapai lebih dari 50%. Apabila trend positif ini terjadi secara konsisten sampai dengan tiga tahun berikutnya, maka target RPJMD tahun 2018 sangat mungkin dapat tercapai lebih awal atau sebelum tahun 2018. Bahkan sampai dengan tahun 2016 ini untuk komoditi jagung sudah melebihi target RPJMD dengan realisasi sampai dengan tahun 2016 sebesar 162,23%.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi produksi pertanian tanaman pangan pada beberapa komoditi khususnya padi salah satu penyebabnya adalah antara lain :

- 1) terjadinya konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun. Data BPS menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 telah terjadi pengurangan luas lahan pertanian.
- 2) produksi pertanian tanaman pangan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen para petani di Kota Bima.
- 3) Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang dapat mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian tanaman pangan.



Sedangkan beberapa faktor kunci keberhasilan tercapainya beberapa komponen indikator kinerja produksi pertanian adalah meliputi :

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menetapkan lahan pertanian berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima sehingga lahan pertanian tanaman pangan yang ada di bagian timur Kota Bima ditetapkan sebagai kawasan penyangga yang tidak boleh dialihfungsikan.
- 2) Adanya partisipasi dan komitmen para penyuluh dan tenaga teknis untuk terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian.

Terkait dengan penggunaan sumber daya, maka sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada telah digunakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk lebih memantapkan lagi upaya pencapaian indikator kinerja produksi pertanian pada tahun-tahun berikutnya, maka pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program peningkatan kesejahteraan petani maupun program peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan perlu untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

### **13. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang baik**

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik diukur melalui kinerja sejumlah indikator utama sebagaimana berikut.

#### **a. Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik**

Berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 482 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Bima, menetapkan Panjang Jalan Kota Bima 204,34 Km, di pertengahan tahun 2016 terjadi perubahan atas Penetapan Status Ruas Jalan Kota melalui Perwali nomo 381 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Fungsi Jalan Kota Bima, dengan Panjang 258,11 Km. sehingga membawa dampak pada perubahan target kinerja pada RPJMD Kota Bima dan Perubahan Realisasi RPJMD Kota Bima.

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pada tahun 2017 ditargetkan jalan dalam kondisi baik sepanjang 189,50 Km, dan terealisasi sepanjang 196,62 Km atau sebesar 103,8%. berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dalam kondisi baik.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik sebesar 147,14 Km. atau sebesar 102,9% dari target 143,04 Km, maka ditahun 2017 capaian keinerja mengalami peningkatan sebesar 0,90% dari tahun lalu. Berdasarkan indikator ini juga kinerja Dinas PUPR menunjukkan kinerja tahun 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Target akhir RPJMD 2018 yang semula sebesar 173,69 Km atau 85%, dengan Penetapan Status Ruas Jalan Kota Sepanjang 204,43 Km, dan melalui SK penetapan Status Ruas Jalan Kota Bima tahun 2016 tersebut menjadi 258,11 Km, atau 85%, maka pencapaian sasaran tahun pengukuran sebesar 76,18%.

Capaian target indikator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

**Tabel 3.31. Kinerja Indikator Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik**

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir RPJMD (km)	Capaian s.d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (km)	Realisasi (km)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	72,01	189,50	196,62	103,8	258,11	76,18%

Pencapaian kinerja indikator ini didukung oleh Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan jembatan. Melalui program-program tersebut telah dilaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tersebar di wilayah Kota Bima.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja panjang jalan kota dalam kondisi baik, antara lain :

- Dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur khususnya kawasan perkotaan.
- Fungsi Kota Bima sebagai kawasan strategis provinsi.

Pencapaian sasaran strategis peningkatan infrastruktur perkotaan menemui beberapa hambatan/masalah, seperti :

- Kondisi topografi berpengaruh pada penyediaan infrastruktur jalan, di mana pada kawasan yang berbukit, trase jalan lebih panjang karena mengikuti pola topografi kawasan. Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya yang harus disediakan untuk penyediaan infrastruktur jalan tersebut.
- Adanya kelompok-kelompok permukiman yang jauh dari kawasan perkotaan menjadikan tingginya infrastruktur yang harus disediakan untuk menjamin ketersediaan akses ke kawasan tersebut.
- Tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman baru menuntut meningkatnya ketersediaan infrastruktur.

Adapun strategi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi terkait peningkatan infrastruktur perkotaan ini, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk terus mendapatkan dukungan dalam pembangunan infrastruktur.
- Melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai prioritas, potensi dan permasalahan per kawasan.

b. Persentase luas permukiman kumuh

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan.

Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi

terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterahkan.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Terbentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slum area* sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan.

Pada Tahun awal perencanaan permukiman kumuh tercatat seluas 108,98 Ha. Pada tahun 2017 direncanakan penanganan pengurangan wilayah kumuh mencapai 29,56 Ha atau sebesar 27,13% dan terealisasi mencapai 32,06 Ha atau 29,42%. Maka capaian kinerja tahun 2017 sebesar 108,45%

Jika dibandingkan pada tahun 2016 sudah terealisasi sebesar 26,20 Ha atau 24,04%. dari target 23,06 Ha dengan peningkatan 3,37 Ha. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 5,86 Ha atau 5,38% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 sebesar 108,98 Ha atau 31,71% maka pencapaian kinerja pada indikator ini sudah mencapai 29,42%. Dengan luas Kawasan Kumuh Tertangani sebesar 32,06 Ha.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh pengalokasian anggaran untuk indikator ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima lebih besar dari tahun sebelumnya dan Keikutsertaan masyarakat di dalam mengontrol pembangunan daerah semakin tinggi.

Keberhasilan tersebut menunjukkan Semangat kerja dan disiplin kerja aparatur semakin meningkat.

Capaian target indikator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

**Tabel. 3.32. Kinerja Indikator Porsentase Luas Permukiman Kumuh**

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Porsentase Luas Permukiman Kumuh Tertangani	24,04	29,56	32,06	108,45	100,00	52,35

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh, telah dilaksanakan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh serta Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Dari program-program tersebut antara lain telah dilaksanakan pembangunan maupun peningkatan kualitas jalan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja, antara lain :

- Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program prakarsa permukiman 100 0 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
- Adanya kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengurangi rumah tidak layak huni antara lain melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Adapun sejumlah hambatan/masalah yang dihadapi, anatra lainsebagai berikut :

- Pengelolaan sampah yang belum terpadu.
- Masih adanya masyarakat yang kurang sadar tentang perilaku pola hidup bersih dan sehat.
- Masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program untuk sasaran strategis ini antara lain ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pemerintah Kota Bima telah menyusun strategi pemecahan masalah melalui sejumlah langkah-langkah strategis, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antar OPD sehingga terjadi sinergitas dan menghindari konflik dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
- Membentuk kelompok-kelompok kemasyarakatan yang turut berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang dapat didaur ulang sehingga mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan program-program yang terkait dengan sanitasi, persampahan, air bersih, perumahan dan permukiman.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berpola hidup bersih dan sehat lebih baik lagi.

c. Persentase luas kawasan tepian air yang tertata

Konsep kota tepian air (*waterfront city*) merupakan salah satu pendekatan yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Bima dalam mendorong pertumbuhan kawasan strategis Kota di sepanjang pesisir Teluk Bima khususnya mulai dari Perbatasan Kota di Kawasan Niu sampai dengan Kawasan Pelabuhan Laut Bima dengan luas keseluruhan 138,15 hektar. *Waterfrot city* (Kota Tepian) adalah bagian kota yang berbatasan fisik dengan air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Sedangkan secara khusus di Kota Bima *waterfront city* Teluk Bima adalah bagian kota yang berbatasan fisik dengan tepi pantai yaitu mulai dari Niu – Lawata sampai Amahami. Penataan dan pembangunan kota tepian air diartikan sebagai suatu proses pembangunan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi ke perairan. Kawasan *waterfront city* biasanya berupa area pelabuhan, perdagangan, pariwisata, permukiman atau industri.

Penataan kawasan Kota Tepian Air Teluk Bima pada tahun 2017 mampu terealisasi seluas sekitar 3,1 hektar, dari target sebesar 4,20 hektar kawasan tepian air teluk Bima yang diperjanjikan atau terealisasi 7,39 persen dari target 10 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penataan kawasan kota tepian air pada tahun 2017 direalisasikan seluas 7,39% dari total kawasan

rencana yang berupa penataan Lawata, taman perbatasan Niu, Masjid Terapung Amahami dan Penataan Pantai Kolo.

**Tabel 3.33. Capaian Kinerja Persentase Luas Kawasan Tepian Air yang Tertata**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2015	2,71 %	2,53 %	93,37 %
2016	10,00 %	3,98 %	39,78 %
<b>2017</b>	<b>10,00%</b>	<b>7,39%</b>	<b>73,90 %</b>

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2018

Capaian kinerja penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima sampai dengan tahun 2017 memang dirasakan melambat. Terdapat beberapa faktor yang menghambat percepatan penataan dan pembangunan kawasan kota tepian air Teluk Bima yaitu antara lain :

- Belum tuntasnya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detail tata Ruang Kecamatan Rasanae Barat di tingkat BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) sehingga pembahasan raperda pada Badan legislasi belum bisa dilakukan. Hal ini sedikit menghambat investasi pada lahan-lahan privat dikarenakan arahan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi wilayah yang belum ditetapkan dalam bentuk perda RDTR.
- Pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat menyebabkan investasi di bidang infrastruktur perkotaan dan pembangunan kawasan juga berpengaruh.
- Dampak banjir bandang tahun 2016 sehingga alokasi anggaran lebih difokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sedangkan beberapa faktor kunci keberhasilan capaian kinerja penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima adalah antara lain: :

- Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan kota tepian air Teluk Bima sebagai icon atau *landmark* Kota Bima.
- Sudah tersedia design arsitektur dan *detail engineering design* (DED) yang memadukan unsur arsitektur modern dengan unsur arsitektur lokal (budaya *dana mbojo*) sebagai panduan dan pedoman dalam melakukan penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dan pembiayaan yang dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja, maka sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam rangka untuk lebih memantapkan lagi upaya pencapaian indikator kinerja penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima pada tahun-tahun berikutnya, maka pelaksanaan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, program pembangunan jalan dan jembatan, program perencanaan dan pengendalian tata ruang, program peningkatan sarana dan prasarana pertamanan perlu untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

#### **14. Sasaran Strategis Terpeliharanya keamanan dan ketertiban**

Pembangunan yang dilaksanakan secara merata dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis terpeliharanya keamanan dan ketertiban adalah angka kriminalitas.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bima menargetkan penurunan jumlah kriminalitas dengan menetapkan indeks kriminalitas dibawah 100%. Data menyebutkan bahwa jumlah kriminalitas tahun 2017 sebanyak 936 kasus. Dari jumlah kasus tersebut yang sudah diselesaikan adalah sebanyak 274 kasus kemudian yang masih dalam penyelidikan 621 kemudian penyidikan 41 kasus. Dengan menggunakan formula perhitungan indeks kriminalitas maka diperoleh angka kriminalitas di Kota Bima adalah lebih dari 100 dari target 97,50 atau kurang dari 100. Jumlah kasus ini naik secara signifikan dibandingkan dengan jumlah tindak kriminalitas pada tahun 2016 yaitu sebanyak 201 kasus, dan tahun jumlah kriminalitas tahun 2015 yang tercatat sebanyak 185 kasus. Dengan menggunakan formulasi yang telah ditentukan dalam menghitung indeks kriminalitas, diketahui indeks kriminalitas tahun 2017 sebesar 108,64%. Indeks kriminalitas tahun 2016 bernilai lebih dari 100%, artinya terjadi kenaikan jumlah kasus dari tahun sebelumnya.



**Tabel 3.34. Capaian Kinerja Indeks Kriminalitas Kota Bima Tahun 2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Angka Kriminalitas 2015	<b>96,25</b>	<b>118,29</b>	81,37
Angka Kriminalitas 2016	<b>96,25</b>	<b>125,83</b>	76,49
Angka Kriminalitas 2017	97,50	133,87	72,83

Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, terjadi kenaikan jumlah kasus kriminalitas dibanding tahun sebelumnya.

Beberapa program pembangunan strategis yang mendukung pencapaian kinerja indikator ini antara lain melalui Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis, Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Selain itu, terdapat pula program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima, yaitu :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dengan kegiatan-kegiatan :
  - Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
  - Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Krantibum
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), melalui Kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.

## **B. Realisasi Anggaran**

## **1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Intensifikasi dilakukan antara lain adalah memperkuat basis pajak, sedangkan ekstensifikasi dilakukan antara lain adalah memperluas obyek-obyek pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Menjaga kelestarian lingkungan, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang, nomor 34 tahun 2000, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

### **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Pada tahun 2017 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, Artinya perlu upaya mengoptimalkan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal alokasi dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, sinkronisasi data dan informasi untuk kebutuhan perhitungan target PAD, Dana Perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sah.

#### **a. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD**

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui :

- 1) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah seperti membuat dan merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan potensi dan perkembangan daerah.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan dengan menyerderhanakan tata kelola administrasi pajak dan retribusi daerah.
- 3) Peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha guna memenuhi kewajibannya agar taat dan bangga membayar pajak daerah dan retribusi daerah serta kewajiban lainnya.
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah seperti melakukan uji petik terhadap objek-objek retribusi daerah.
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait, seperti menginventarisasi dan menertibkan objek-objek pajak dan retribusi.
- 6) Optimalisasi kinerja aparat pengelola pendapatan daerah yang akuntabilitas.
- 7) Peningkatan tata kelola administrasi, dan penegakan sanksi bagi masyarakat dan dunia usaha yg tidak taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

**b. Intensifikasi dan Ektensifikasi Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang sah**

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dilakukan melalui:

- 1) Sinkronisasi data dan informasi untuk kebutuhan perhitungan dan penentuan alokasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, seperti data jumlah PNS, luas wilayah, jumlah penduduk dan data-data pendukung lainnya.
- 2) Memenuhi permintaan data dan laporan tepat waktu dan tepat sasaran.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan alokasi dana perimbangan yang meliputi DAU, DAK dan DBH.

Dalam rangka optimalisasi upaya dan langkah tersebut di atas, Pemerintah Kota Bima dalam mengelola beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD yang didasarkan kepada Peraturan Daerah sebagai berikut:

- Pajak Daerah, yang terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Retribusi Daerah, antara lain :
  - Retribusi Jasa Umum, seperti : Retribusi Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Pelayanan Parkir di tepi jalan umum; Pengujian kendaraan bermotor; Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  - Retribusi Jasa Usaha, seperti : Retribusi pemakaian kekayaan daerah; Pasar Grosir dan/atau pertokoan; Retribusi terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga; Retribusi Rumah Potong Hewan.
  - Retribusi Perizinan Tertentu, seperti : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin gangguan/keramaian (HO); Izin Trayek; Izin usaha perikanan.

**c. Target dan Realisasi Pendapatan**

Target pendapatan daerah kota Bima pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 799.256.543.005,79 terealisasi sebesar Rp. 956.667.546.835,11 atau 119,69%. Sedangkan pada tahun anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp. 776.841.005.773,38 terealisasi sebesar Rp. 781.084.159.160,86 atau 100,55%. Total jumlah penerimaan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 175.583.387.674,25 atau 18,35%.

Secara garis besar, target dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.35. Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bima Tahun 2017**

No.	Komponen	Tahun 2017		%
		Target	Realisasi	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>49.530.899.104,04</b>	<b>35.490.315.120,11</b>	<b>71,65</b>
1.1.1	Pajak Daerah	14.419.660.000,00	13.913.270.478,00	96,49
1.1.2	Retribusi Daerah	6.923.138.500,00	5.048.756.746,00	72,93
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	912.766.923,00	2.059.377.247,72	225,62
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	27.275.333.681,04	14.468.910.648,39	53,05
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>695.331.016.674,00</b>	<b>707.754.462.556,00</b>	<b>101,79</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	40.641.289.674,00	58.616.143.982,00	144,23
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	455.972.250.000,00	455.972.250.000,00	100,00

1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	198.717.477.000,00	193.166.068.574,00	97,21
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>54.394.627.227,75</b>	<b>213.422.769.159,00</b>	<b>392,36</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	168.997.000.000,00	#DIV/0!
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	44.588.558.465,00	36.619.697.140,00	82,13
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
1.3.5	Dana Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	306.068.762,75	306.072.019,00	100,001
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>799.256.543.005,79</b>	<b>956.667.546.835,11</b>	<b>119,69</b>

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)*

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, PAD menyumbang 6,20% dari total pendapatan Kota Bima. Sedangkan kontribusi terbesar berasal dari Dana Perimbangan, yaitu mencapai 87,00% dan sisanya sebesar 6,81% adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penggalian potensi pendapatan daerah tahun 2017 antara lain :

- Masih terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
- Efektifitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimal guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD;
- Perlu ditingkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD;
- Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi daerah; dan
- Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah;
- b. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan secara intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi;
- c. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan;
- d. Meningkatkan kontribusi BUMD melalui pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif seperti perbaikan manajemen, pembentukan subholding baru dan peningkatan profesionalisme BUMD serta memperkuat permodalan BUMD;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi baik secara langsung seperti pada saat perhitungan Lifting dan rekonsiliasi maupun melalui surat;
- f. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dan hibah; dan
- g. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

## **2. *Pengelolaan Belanja Daerah***

Dampak berlakunya otonomi dan desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah semakin luasnya kewenangan pemerintah daerah mengelola dana masyarakat berupa APBD untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola dana tersebut secara lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel sehingga akan memberikan manfaat berupa:

- a. Efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
- c. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- d. Menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah dan melakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
- e. Mewujudkan pemerintah yang baik dan terbuka terhadap kepentingan masyarakat.

Oleh karenanya untuk dapat menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabel pengelolaan sumber daya daerah tersebut. Maka anggaran daerah sebagai salah satu

alat kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sudah selayaknya diarahkan seoptimal mungkin dengan penerapan konsep efisiensi, efektivitas dan akuntabel dalam pengalokasiannya.

**a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Belanja daerah pemerintah Kota Bima pada tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu pemerintah Kota Bima sangat menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan penghematan serta diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bima dalam berbagai kebijakannya selalu memberikan perhatian khusus terhadap program prioritas daerah baik dalam rangka pencapaian visi dan misi pada tahun yang berjalan maupun bagi pencapaian pelayanan publik (*good local governance*) sebagai perwujudan atas terlaksananya otonomi daerah. Pemerintah Kota Bima memberdayakan seluruh elemen kebijakan yang sudah terimplementasikan pada semua OPD yang kemudian dijabarkan pada program/kegiatan. Pemerintah Kota Bima tetap menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas belanja dengan memanfaatkan sumber pendapatan secara maksimal.

Arah Pengelolaan belanja daerah didasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

### **1) Belanja Pegawai**

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD sebesar 6% (asumsi sesuai dengan kebijakan belanja tahun sebelumnya atau tahun anggaran 2016);
- b) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD telah diperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, serta estimasi alokasi untuk pembayaran gaji ke 13 PNSD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- c) Untuk mengantisipasi adanya pemberian tunjangan hari raya/Gaji ke-14 jika tidak mengalami kenaikan gaji pokok, maka nilai alokasi anggaran diperhitungkan sebesar untuk gaji pokok sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d) Untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun anggaran berjalan dan formasi pegawai tahun 2017 serta pengangkatan CPNSD alumni STPDN tahun 2016.
- e) Penyediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan jaminan kesehatan (ASKES) bagi PNSD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- f) Penganggaran belanja pegawai untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5% dari target pajak daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan belanja hibah antara lain:

- a) Penganggaran belanja hibah dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan



daerah, dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

- b) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah, dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c) Pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Di samping itu, penetapan besaran bantuan tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- d) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, telah diupayakan pembatasan terhadap jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dan format pertanggungjawabannya telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3) Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017.

## **Kebijakan Belanja Langsung**

### Belanja Pegawai

- a) Dasar penghitungan besaran honorarium pagi PNSD disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja;
- b) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang

terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.

#### Belanja Barang dan Jasa

- a) Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
- b) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan beban pekerjaan;
- c) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- d) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
- e) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi;
- f) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara). sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

#### Belanja Modal

- a) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing OPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;

- b) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

### Target dan Realisasi Belanja

Target belanja daerah Kota Bima pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 825.286.774.556,35 dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 783.226.750.197,00 atau sebesar 94,90 %. Belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari target belanja tidak langsung sebesar Rp. 360.802.532.967,45 Pemerintah Kota Bima mampu merealisasikan sebesar Rp. 352.298.605.324,00 atau sebesar 97,64 %. Adapun terkait belanja langsung dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 464.484.241.588,90 telah mampu direalisasikan sebesar Rp. 430.928.144.873,00 atau sebesar 92,78 %.

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Bima pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.36. Rekapitulasi Belanja Pemerintah Kota Bima Tahun 2017**

No	Komponen Belanja Daerah	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>360.802.532.967,45</b>	<b>352.298.605.324,00</b>	<b>97,64</b>
	1.1. Belanja Pegawai	324.064.451.311,45	319.792.429.749,00	98,68
	1.2. Belanja Hibah	23.599.785.000,00	21.313.903.978,00	90,31
	1.3. Belanja Bantuan Sosial	10.315.885.000,00	9.392.865.500,00	91,05
	1.4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintahan Desa dan Partai Politik	822.411.656,00	775.531.097,00	94,30
	1.5. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.023.875.000,00	51,19
<b>2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>464.484.241.588,90</b>	<b>430.928.144.873,00</b>	<b>92,78</b>
	2.1. Belanja Pegawai	40.152.432.511,00	36.254.648.550,00	90,29
	2.2. Belanja Barang dan Jasa	171.859.407.597,90	152.390.470.850,00	88,67
	2.3. Belanja Modal	252.472.401.480,00	242.283.025.473,00	95,96
<b>Total Belanja</b>		<b>825.286.774.556,35</b>	<b>783.226.750.197,00</b>	<b>94,90</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Adapun realisasi sejumlah program dan kegiatan yang secara langsung berpengaruh pada pencapaian perjanjian kinerja tingkat Kota Bima dideskripsikan pada tabel berikut.

2107Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(6)
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Rp. 107.370.000	Rp. 107.320.000	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1 : <b>Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama</b>
Program bantuan hibah kepada Baznasda	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Rp. 1.230.200.000	Rp. 1.209.410.000	
Program Belanja hibah dan Bantuan Sosial pada Masjid dan Mushollah	Rp. 4.185.000.000	Rp. 4.185.000.000	
	Rp. 5.722.570.000	Rp. 5.701.730.000	
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 274.213.700	Rp. 260.445.500	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2 : <b>Meningkatnya kerukunan hidup beragama</b>
Program bantuan hibah kepada FKUB	Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000	
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	Rp. 471.112.000	Rp. 466.299.300	
	Rp. 1.145.325.700	Rp. 1.126.744.800	
Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 171.220.000	Rp. 171.220.000	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-3 : <b>Lestarinya nilai-nilai budaya lokal</b>
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 26.020.000	Rp. 26.020.000	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 30.870.000	Rp. 30.870.000	
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Seni Budaya	Rp. 5.006.408.000	Rp. 5.005.553.000	
	Rp. 5.234.518.000	Rp. 5.233.663.000	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 2.165.806.250	Rp. 2.107.033.750	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-4 : <b>Meningkatnya mutu pendidikan</b>
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 27.048.337.700	Rp. 25.437.260.414	
Program Pendidikan Non Formal	Rp. 101.687.500	Rp. 76.772.400	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1.220.051.000	Rp. 1.139.347.281	

2107Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(6)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 450.013.500	Rp. 404.267.500	
	Rp. 30.985.895.950	Rp. 29.164.681.345	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 2.165.806.250	Rp. 2.107.033.750	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-5 : <b>Meningkatnya daya saing</b>
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 27.048.337.700	Rp. 25.437.260.414	
Program Pendidikan Non Formal	Rp. 101.687.500	Rp. 76.772.400	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1.220.051.000	Rp. 1.139.347.281	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 450.013.500	Rp. 404.267.500	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 6.448.142.843	Rp. 6.024.998.634	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 176.762.500	Rp. 166.997.150	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 141.397.500	Rp. 137.517.500	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 761.090.200	Rp. 648.766.200	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 525.805.000	Rp. 509.646.334	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 159.299.000	Rp. 159.134.000	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 151.000.000	Rp. 148.680.000	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 194.150.000	Rp. 194.040.000	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 267.155.000	Rp. 266.626.000	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 103.313.300	Rp. 83.570.000	
Program Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM	Rp. 292.370.500	Rp. 279.350.614	
Program Peningkatan kesejahteraanPetani	Rp. 532.621.700	Rp. 509.367.700	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Rp. 487.356.300	Rp. 487.327.400	

2107Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(6)
Pedesaan/Kelurahan			
	Rp. 43.630.759.793	Rp. 38.780.702.877	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 1.572.565.250	Rp. 1.501.365.203	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-6 : <b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 6.448.142.843	Rp. 6.024.998.634	
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 60.597.100	Rp. 59.897.100	
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Rp. 23.989.500	Rp. 23.839.500	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 910.832.000	Rp. 872.157.500	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 176.762.500	Rp. 166.997.150	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 546.886.500	Rp. 507.559.000	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 817.807.000	Rp. 684.675.100	
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Rp. 9.610.224.000	Rp. 9.569.320.783	
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp. 9.889.601.198	Rp. 8.362.669.193	
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Rp. 133.135.800	Rp. 118.314.800	
Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan dan Reproduksi dan KB	Rp. 147.849.500	Rp. 145.341.950	
	Rp. 30.338.393.191	Rp. 28.037.135.913	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 141.397.500	Rp. 137.517.500	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-7 : <b>Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar</b>
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 8.729.003.000	Rp. 8.602.010.000	
Program Pengembangan Perumahan	Rp. 3.880.410.000	Rp. 3.830.885.606	
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Rp. 664.900.000	Rp. 655.179.000	
Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	Rp. 7.882.000	Rp. 7.882.000	
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp. 91.719.400	Rp. 85.039.000	
Program Pengembangan	Rp. 3.880.410.000	Rp. 3.830.885.606	

2107Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(6)
Perumahan			
Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 7.429.736.000	Rp. 7.359.519.000	
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rp. 14.975.773.000	Rp. 14.912.123.500	
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp. 16.009.856.000	Rp. 15.999.981.000	
	Rp. 55.811.086.900	Rp. 55.421.022.212	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Penyusunan LKIP )	Rp. 1.347.870.485	Rp. 1.328.075.875	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-8 : <b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp. 175.935.000	Rp. 168.359.800	
Program pengembangan data/informasi	Rp. 138.793.300	Rp. 138.718.077	
Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 1.971.618.573	Rp. 1.967.941.409	
Program koordinasi perencanaan pembangunan social dan pemerintahan	Rp. 754.938.500	Rp. 749.812.797	
Program koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur	Rp. 597.100.000	Rp. 591.883.504	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (untuk laporan keuangan)	Rp. 1.488.835.299	Rp. 1.437.224.618	
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 258.870.000	Rp. 243.636.100	
Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Rp. 1.600.490.039	Rp. 1.585.453.203	
Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.810.682.616	Rp. 2.701.470.565	
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 42.140.000	Rp. 37.633.000	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 1.993.416.337	Rp. 1.985.546.502	
	Rp. 13.180.690.149	Rp. 12.935.755.450	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Rp. 280.909.000	Rp. 255.508.500	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-9 : <b>Meningkatnya</b>
Program Pembinaan dan	Rp. 2.811.026.900	Rp. 2.780.765.500	

2107Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(6)
Peningkatan Pelayanan Masyarakat			pelayanan publik yang prima
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.791.613.250	Rp. 1.742.369.271	
	Rp. 4.883.549.150	Rp. 4.778.643.271	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 33.300.000	Rp. 28.050.000	
Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp. 3.601.952.000	Rp. 3.585.767.713	
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Rp. 1.792.795.743	Rp. 1.742.175.643	
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp. 203.631.000	Rp. 189.284.300	
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp. 1.130.395.100	Rp. 1.124.072.824	
Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata	Rp. 95.104.150	Rp. 95.061.800	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp. 832.415.400	Rp. 811.577.000	
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Rp. 262.661.500	Rp. 234.969.300	
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp. 335.288.750	Rp. 333.748.400	
Program pengembangan budidaya perikanan	Rp. 661.267.000	Rp. 659.812.890	
Program pengembangan perikanan tangkap	Rp. 1.244.665.000	Rp. 1.241.165.300	
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp. 260.169.500	Rp. 258.543.042	
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp. 3.601.952.000	Rp. 3.585.767.713	
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Rp. 181.510.000	Rp. 125.730.000	
Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp. 203.631.000	Rp. 189.284.300	
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Rp. 1.792.795.743	Rp. 1.742.175.643	
	Rp. 16.233.533.886	Rp. 15.757.901.568	
			Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-11 : <b>Meningkatnya Pendapatan Masyarakat</b>
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp. 175.439.400	Rp. 153.948.519	
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Rp. 1.792.795.743	Rp. 1.742.175.643	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 532.621.700	Rp. 509.367.700	
Program pemberdayaan	Rp. 30.000.000	Rp. 29.622.750	



2107Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(6)
ekonomi masyarakat pesisir			
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Rp. 181.510.000	Rp. 125.730.000	
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp. 260.169.500	Rp. 258.543.042	
	Rp. 2.972.536.343	Rp. 2.819.387.654	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya	Rp. 7.096.617.000	Rp. 6.753.885.700	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-12 : <b>Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan)</b>
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp. 3.507.818.800	Rp. 3.439.964.227	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp. 92.650.000	Rp. 91.020.400	
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp. 62.290.150	Rp. 61.870.650	
Program pengembangan budidaya pertanian	Rp.		
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp. 78.222.500	Rp. 76.317.000	
	Rp. 10.837.598.450	Rp. 10.423.057.977	
Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 7.429.736.000	Rp. 7.359.519.000	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-13 : <b>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang baik</b>
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp. 16.009.856.000	Rp. 15.999.981.000	
Program peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 3.551.018.000	Rp. 3.490.783.158	
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp. 3.446.174.700	Rp. 3.443.203.600	
	Rp. 30.436.784.700	Rp. 30.293.486.758	
Program pengembangan destinasi pariwisata	Rp. 2.118.488.000	Rp. 2.071.523.234	
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 27.465.894.800	Rp. 27.430.512.000	
	Rp. 90.457.952.200	Rp. 90.089.008.750	
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp. 471.112.000	Rp. 466.299.300	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-14 : <b>Terpeliharanya keamanan dan ketertiban</b>
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 977.277.000	Rp. 963.846.500	
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan	Rp. 347.642.000	Rp. 347.120.614	

2107Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(6)
tindak kriminal			
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Rp. 25.125.000	Rp. 25.065.000	
	Rp. 1.821.156.000	Rp. 1.802.331.414	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 313.255.565.712</b>	<b>Rp. 302.071.766.231</b>	

### Permasalahan dan Solusi

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan kebijakan Belanja Daerah Kota Bima tahun anggaran 2017 antara lain:

- Perencanaan Anggaran Kas masing-masing OPD tidak dilakukan secara optimal. sehingga pelaksanaan kegiatan tidak konsisten sesuai rencana yang dituangkan dalam DPA OPD yang mengakibatkan realisasi belanja sebagian besar bertumpuk pada akhir tahun anggaran;
- Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan serta belum maksimalnya penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah berikut:

- Bagi Dinas/instansi atau OPD teknis agar membuat perencanaan anggaran KAS yang benar sesuai dengan jadwal dari masing-masing kegiatan yang tercantum dalam DPA OPD tersebut.
- Perlu dilaksanakan Pendidikan pelatihan serta bimbingan teknis sistem pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan pengelolaan aset daerah.

## ***BAB IV Penutup***

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis kinerja sebagaimana yang tertuang dalam BAB III, akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2017 disimpulkan bahwa capaian sasaran, capaian indikator kinerja, serta akuntabilitas pendapatan dan belanja daerah disimpulkan sebagai berikut.

#### **1. Capaian Sasaran**

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan 14 sasaran strategis. Dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase capaian 14 sasaran tersebut sebesar 99,00%. Persentase capaian terendah adalah Sasaran Strategis ke-14, yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban yakni sebesar 72,83%. Adapun persentase capaian tertinggi dicatatkan oleh Sasaran Strategis ke-1, yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama yang mencapai angka 108,72%.

#### **2. Capaian Indikator Kinerja**

Capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2017, terdapat 26 indikator kinerja dikategorikan 89,29% berhasil tercapai, SERTA 3 indikator kinerja atau 10,34% cukup berhasil. Rata-rata persentase capaian adalah sebesar 99,66%, dengan nilai persentase capaian terendah sebesar 72,88% yaitu pada capaian indikator kinerja angka kriminalitas, dan capaian persentase tertinggi adalah sebesar 131,81% yaitu pada capaian indikator kinerja rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) SD.

### **B. Saran**

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, maka diperlukan adanya peningkatan kerja sama seluruh pihak yang terkait dalam bentuk :

1. Partisipasi instansi Pemerintah Provinsi NTB di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap, jelas, cepat, tepat dan akurat sehingga pengambilan kebijakan penetapan program dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien guna peningkatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian jajaran Pemerintah Kota Bima dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih nyata.
3. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kota Bima dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kota Bima yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.